Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (*Studi kasus pada peserta PKH Kenagarian Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

***Oleh* :**

SETI SEKIAWATI
NIM : 3215.124

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITTINGGI

2019

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta Shalawat beriring salam kepada Nabi dan Rasul akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan ini sehingga memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini, yang berjudul ***"Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada peserta PKH Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota)".*** Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Jurusan S1 Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi, dan dengan usaha serta motivasi dari berbagai pihak, Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada orangtua penulis Ayahanda **Usman** dan ibunda **Rohani** yang sudah melahirkan dan membesarkan dengan segala cinta dan kasih sayangnya dan juga kepada saudara-saudara penulis **Beni Charles** dan **Susi Nofri Yanti**. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala doa,

perhatian, dorongan serta pengorbanannya baik moril maupun materil selama penulis dalam pendidikan hingga selesai. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
3. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
4. Ibu **Rini Elvira, SE, M.Si** selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.
5. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku Dosen Penasihat Akademik (PA).
6. Bapak **Yuwarman Mansur, SE, MM** dan Bapak **H. Raymond Dantes, Lc, MA** selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*. Semoga amal kebaikan Beliau dilipatgandakan oleh Allah SWT.
7. Kepada seluruh Dosen dan Staff IAIN Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan semua amal kebaikan mereka.
8. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pihak Wali Nagari Maek yang telah memberikan support dan informasi terkait penulisan.

9. Peserta PKH yang sudah bersedia menjadi responden dimana mempunyai peranan yang paling besar dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman seperjuangan S1 Ekonomi Islam angkatan 2015 khususnya kelas D yang selalu membersamai selama kurang lebih 4 tahun ini, jadwal kuliah telah di rilis kita yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan UTS dan UAS pulang sore demi mendapatkan mata kuliah intensif karna kita ingin lebih dari yang lain, belajar di luar jam mata kuliah hingga proses skripsi.

Semoga Allah SWT melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih dan lapang dipenuhi cinta-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dikarenakan segala keterbatasan penulis. Penulis berharap kritik dan saran membangun dari semua pihak yang berkenan membaca skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, pihak-pihak pengambil kebijakan kepariwisataan, pembaca, dan bagi penulis sendiri.

Bukittinggi, 23 Juli 2019

Penulis

Seti Sekiawati

NIM. 3215.124

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
HALAMAN SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Batasan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 11
G. Penjelasan Judul 12
H. Kajian Terdahulu 14
I. Sistematika Penulisan 19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan
   1. Pengertian Kemiskinan 21
   2. Indikator Kemiskinan 22
   3. Penyebab Kemiskinan 24
   4. Pembagian Kemiskinan 26
   5. Program Pengentasan Kemiskinan 26
B. Kemiskinan dalam Islam
   1. Pengertian Kemiskinan 28
   2. Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan 32
   3. Cara Menanggulangi Kemiskinan 35
   4. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan 38
   5. Solusi Ekonomi Syariah terhadap Kemiskinan 42
C. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam
   1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam .. 43
   2. Konsep Kesejahteraan dalam Islam 45
   3. Dasar Hukum Kesejahteraan dalam Al-qur'an 48
   4. Meningkatkan Kesejahteraan dalam Pandangan Islam 50
D. Program Keluarga Harapan
   1. Pengertian PKH 52

2. Landasan Hukum 52
3. Dasar Pelaksanaan..... 53
4. Tujuan PKH 54
5. Sasaran PKH 55
6. Kriteria Komponen..... 55
7. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH..... 56
8. Pemenuhan Kewajiban..... 57
9. Besaran Bantuan PKH..... 57
10. Kerangka Pemikiran..... 58
11. Hipotesis..... 59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 60
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 60
C. Sumber Data 61
D. Populasi dan Sampel..... 62
E. Teknik Pengumupulan Data 63
1. Kuesioner 63
2. Wawancara 64
3. Dokumentasi 65
F. Variabel Penelitian..... 65
G. Teknik Analisa Data 66
1. Uji Instrumen 67
a. Uji Validitas 67
b. Uji Reliabilitas 68
2. Asumsi Klasik 68
a. Uji Normalitas 68
b. Uji Autokorelasi..... 69
c. Uji Heteroskedastisitas 70
3. Analisis Regresi Linear Sederhana 71
4. Uji R^2 (Koefesien determinasi)..... 71
5. Uji Hipotesis 73
a. Uji T 73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Maek..... 76
1. Sejarah Nagari Maek 76
2. Aspek Geografis 78
3. Aspek Demografi..... 80
4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 80

5. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 82
6. Aspek Daya Saing Nagari 89
B. Hasil Analisis Data
1. Deskripsi Jawaban Responden 92
2. Deskripsi Variabel Penelitian 95
3. Alat Uji Kuesioner 104
a. Uji Validitas 104
b. Uji Reliabilitas 106
6. Asumsi Klasik 107
d. Uji Normalitas 107
e. Uji Autokorelasi 108
f. Uji Heteroskedastisitas 109
7. Analisis Regresi Linear Sederhana 109
8. Uji R^2 (Koefesien determinasi) 111
9. Uji T 111
C. Pembahasan 113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 118
B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pendduduk Miskin di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2018.....4
Tabel 1.2 Jumlah KPM PKH di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2013-2017 7
Tabel 2.1 Ketentuan Penangguhan/Penghentian Bantuan PKH 58
Tabel 2.2 Indeks dan Komponen Bantuan Sosial PKH 59
Tabel 4.2 Nama Jorong di Nagari Maek.....78
Tabel 4.2 Kondisi Topografi Nagari Maek.....79
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk.....80
Tabel 4.4 Struktur Pemerintahan Nagari Maek 83
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan.....85
Tabel 4.6 Sarana Kesehatan di Nagari Maek.....86
Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Medis 87
Tabel 4.8 Jarak Tempuh Nagari Maek menuju ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.....89
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 93
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 94
Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terkahir 94
Tabel 4.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 95
Tabel 4.13 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 95
Tabel 4.14 Tanggapan Responden tentang Pemenuhan Kebutuhan Sekolah Anak.....96
Tabel 4.15 Tanggapan Responden tentang Terpenuhinya Pendidikan Dasar Anak.....97
Tabel 4.16 Tanggapan Responden tentang Dengan Adanya Bantuan PKH Anak Semakin Rajin Bersekolah.....97
Tabel 4.17 Tanggapan Responden tentang Bantuan PKH Dapat Memenuhi Kebutuhan Gizi 98
Tabel 4.18 Tanggapan Responden tentang Tidak Memiliki Kendala untuk Berobat ke Rumah Sakit 99
Tabel 4.19 Tanggapan Responden tentang KPM Semakin Rajin Memeriksakan Diri dan Anak ke Pos Pelayanan Kesehatan.....99
Tabel 4.20 Tanggapan Responden tentang KPM Memiliki Pakaian Berbeda..100
Tabel 4.21 Tanggapan Responden tentang Frekuensi Pembelian Pakaian Meningkat.....100
Tabel 4.22 Tanggapan Responden tentang Jenis Pakaian KPM Bervariasi 101
Tabel 4.23 Tanggapan Responden tentang Kondisi Makanan Sehari-hari KPM Sudah Cukup.....102
Tabel 4.24 Tanggapan Responden tentang Gizi KPM Cukup Terpenuhi 102

Tabel 4.25 Tanggapan Responden tentang Menu Makanan KPM Setiap Hari Bervariasi 103
Tabel 4.26 Tanggapan Responden tentang KPM Memiliki Tempat Tinggal yang Layak 103
Tabel 4.27 Tanggapan Responden tentang Peralatan dan Perlengkapan Rumah KPM Sudah Memadai.....104
Tabel 4.28 Tanggapan Responden tentang Fasilitas Buang Air Besar Sudah Ada Dalam Rumah 105
Tabel 4.29 Uji Validitas Variabel Program Keluarga Harapan (X).....106
Tabel 4.30 Uji Validitas Variabel Pengentasan Kemiskinan (Y) 106
Tabel 4.31 Hasil Uji Reabilitas.....107
Tabel 4.32 Hasil Uji Normalitas 108
Tabel 4.33 Hasil Uji Autokorelasi 109
Tabel 4.34 Uji Heteroskedastisitas 110
Tabel 4.35 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana.....111
Tabel 4.36 Hasil Uji Koefesien Determinasi 112
Tabel 4.37 Hasil Uji T 113

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (**Studi kasus pada peserta PKH Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota**)"**. Skripsi ini ditulis oleh Seti Sekiawati, NIM. 3215.124, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1440 H / 2019 M.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melihat apakah penurunan angka kemiskinan di Kenagarian Maek dipengaruhi oleh adanya dana bantuan PKH atau disebabkan faktor lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Kenagarian Maek dan seberapa besar pengaruhnya.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian ini adalah peserta penerima bantuan PKH di Nagari Maek. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner, dan data sekunder meliputi dokumen dan arsip terdiri dari arsip PKH dan arsip Nagari Maek. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana dan uji t.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kenagarian Maek berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki korelasi yang cukup kuat dengan nilai 0,545. Hasil koefisien determinan (R^2) sebesar 0,297 artinya pengaruh PKH terhadap pengentasan kemiskinan adalah sebesar 29,7% dan 70,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan uji t memperoleh hasil sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel atau 5,958 > 1,989. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya PKH (X) berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y).

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara pasti memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang selalu menjadi atribut negara-negara dunia ketiga. Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan dizaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita negara.[12]

Masalah kemiskinan merupakan masalah perekonomian dan sosial yang bisa menimpa semua manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah membantu, memberdayakan dan memberi makan kaum fakir miskin sehingga dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kita untuk membayar zakat dan memberikan sedekah bagi orang yang membutuhkannya.

Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk

[1] Dyah Ayu Virgoreta, et. al. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No12,
[2]

memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum ini antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga, sebenarnya tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dapat memberi dampak di bidang kesehatan maupun pendidikan. Di bidang kesehatan kemiskinan dapat menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat miskin rentan terjangkit penyakit dan resiko ibu hamil akan kekurangan gizi sehingga mempengaruhi pada perkembangan janin dan tingkat kelahiran hidup. Di bidang pendidikan masalah kemiskinan akan berdampak pada bertambahnya jumlah anak putus sekolah dari keluarga miskin.

Pemerintah telah melaksanakan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.[3]

Dalam sistem ekonomi yang didasarkan kepada Konstitusi UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban memberikan

[3]TNP2K, "Strategi Percepatan Penanggulan Kemiskinan" (Online) tersedia di http://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/overview-of-the-acceleration-strategy

jaminan dan perlindungan terhadap fakir miskin. Dalam pasal 34 UUD 1945 berturut-turut dinyatakan;

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yangg lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.[4]

Islam sangat memperhatikan masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu konsep untuk memberantas kemiskinan adalah dengan berusaha dan bekerja keras. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk bekerja, salah satunya yaitu QS. Al-Jumu'ah ayat 10:[5]



Artinya: "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*"

Kemiskinan bukan takdir dari Allah yang tak dapat diubah. Apabila setiap individu memiliki semangat dalam mencari penghasilan, kemiskinan dapat diberantas dari muka bumi. Ayat ini mengindikasikan bahwa kerja keras mencari nafkah sebagai tahap mencari fadhilah-Nya.

---

[4]Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah: Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hal. 184

[5]Misbahul Munir & A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an (Seri Integrasi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hal. 164

Tabel 1.1
Jumlah Pendduduk Miskin di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	Persentase (%)
2014	1068	-	-
2015	1053	(15)	(1,4 %)
2016	1036	(17)	(1,6 %)
2017	1016	(20)	(1,9 %)
2018	993	(23)	(2,3 %)

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016, Kantor Wali Nagari Maek

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kenagarian Maek berada pada angka 1068 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin mencapai 1053 jiwa berkurang sebesar 1,4%. Angka kemiskinan di Kenagarian Maek terus mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 dengan jumlah penurunannya yang meningkat, sehingga tercatat pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin berada pada angka 993 jiwa dengan rata-rata persentase penurunan sebesar 1,8 %.

Penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan sebelumnya hanya bersifat jangka pendek. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat pemerintah tetapi kemudian ternyata tidak mampu sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan. Seharusnya program-program yang diberikan kepada masyarakat haruslah program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti memperbaiki pendidikan dan kesehatan, karena untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jalan satu-satunya dapat diwujudkan jika

masyarakat itu sehat dan cerdas. Jika masyarakat sehat dan cerdas maka masyarakat itu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan, segala upaya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin adalah program keluarga harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.[6] Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.[7]

[6]Kemsos, *Program Keluarga Harapan*, (Online) tersedia di : https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan

[7]Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Tahun 2011

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran RTSM. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan terjamin maka pendidikan seseorang akan baik, dengan kualitas pendidikan yang layak dan baik maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH dalam bidang pendidikan memberikan peluang lebih baik kepada anak-anak untuk mengenyam bangku pendidikan. Jika kedua aspek tersebut sudah terpenuhi maka kualitas sumber daya manusia meningkat sehingga masyarakat dapat mandiri dan mampu mengentaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Dari kedua komponen tersebut PKH membuat program, untuk kesehatan terdapat Jaminan Kesehatan Nasional dan Beras Untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra) sedangkan untuk pendidikan terdapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Di Sumatera Barat Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan sejak tahun 2007. Namun di Kecamatan Bukik Barisan dilaksanakan pada tahun 2013 pada lima Kenagarian, yaitu Nagari Maek, Nagari Baruah Gunuang, Nagari Banja Laweh, Nagari Koto Tangah, Nagari Sungai Naniang. Nagari Maek merupakan penerima bantuan PKH paling banyak di kecamatan Bukik Barisan dikarenakan nagari Maek merupakan nagari yang terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bukik Barisan. Nagari Maek dihuni oleh 9.274 jiwa, yang terdiri dari 4.511 laki-laki dan 4.763 perempuan. Semuanya terhimpun dalam 2.702 Kepala Keluarga.[8] Pada awal dilaksanakannya PKH di Nagari Maek tahun 2013, peserta PKH berjumlah sekitar 120KPM dan ada tambahan untuk tahun 2016 dan 2017. Sampai pada tahun 2017, jumlah peserta PKH mencapai 1.072 KPM di Kecamatan Bukik Barisan dan di Nagari Maek mencapai angka 741 KPM.

Tabel 1.2
Jumlah KPM PKH di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah (Keluarga Penerima Manfaat) KPM	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	Persentase (%)
2014	118	-	-
2015	114	(4)	(3,4%)
2016	171	57	50 %
2017	741	570	333 %
2018	716	(25)	(3,3%)

Sumber: Pendamping PKH di Kenagarian Maek

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas diketahui bahwa jumlah KPM PKH di Kenagarian Maek pada tahun 2014 yaitu sebanyak 118 KPM. Pada

[8]Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 3,4% (4 KPM). Namun pada tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial, jumlah KPM mengalami kenaikan sebanyak 50% dari tahun sebelumnya (57 KPM) sehingga jumlahnya mencapai 171 KPM. Pada tahun 2017 jumlah KPM bertambah secara drastis sehingga mencapai 741 KPM. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah KPM disebabkan karena ada sejumlah KPM yang sudah dikategorikan mampu dan ada juga KPM yang sudah tidak memiliki kriteria komponen penerima manfaat PKH. Sehingga jumlah KPM PKH pada tahun 2018 berkurang sebanyak 25 KPM (3,3%) dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH terus bertambah dan angka kemiskinan di kenagarian Maek terus mengalami penurunan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mila Roza yang berjudul "Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)" menyatakan bahwa ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima dana PKH yaitu dampak positif yang berpengaruh terhadap kesejahteraannya. Dampak tersebut yaitu kebutuhan pendidikan dan kesehatan dari masyarakat penerima PKH terpenuhi yaitu sebesar 3,83 dan 3,75 meskipun ada dari beberapa keluarga yang memiliki jumlah tanggungan yang lebih banyak. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah penurunan angka kemiskinan di Kenagarian Maek dipengaruhi oleh adanya dana bantuan PKH

atau disebabkan faktor lain. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul yaitu **Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (**Studi kasus pada peserta PKH Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota**).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah yaitu:

1. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dapat memberi dampak di bidang kesehatan maupun pendidikan.
2. PKH merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
3. Terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di Kenagarian Maek selama tahun 2014 hingga 2018 dengan rata-rata persentase penurunan sebanyak 1,8%.
4. Terjadinya penurunan jumlah KPM PKH di Kenagarian Maek selama tahun 2014 hingga 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Seberapa besar pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi masalah hanya pada Pengaruh Program Keluarga Harapan (komponen pendidikan dan kesehatan) terhadap Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan pada peserta PKH Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengentasan kemiskinan dalam penelitian ini akan dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) bagi Keluarga Miskin.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Bagi Peneliti
   a. Penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan di harapkan dapat menjadi tambahan literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.
2. Bagi pemerintah Daerah

   Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
3. Bagi masyarakat

   Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasannya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

G. Penjelasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini maka perlu adanya penjelasan arti dan makna dari istilah-istilah yang terkait dalam judul proposal ini. Adapun judul skripsi ini adalah "**Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (**Studi kasus pada peserta PKH Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota)", maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

1. **Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).[9]
2. **Pengaruh** : Suatu keadaan adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.[10]
3. **PKH** : Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai

[9]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 459

[10] WJS. Poewadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hal. 731

Conditional Cash Transfer (CCT) atau program bantuan bersyarat.[11]

4. **Pengentasan** : Berasal dari kata entas artinya memperbaiki nasib. Pengentasan yaitu proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan.[12]

5. **Kemiskinan** : Berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta atau serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan yaitu situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Pengentasan kemiskinan adalah upaya membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar.

6. **Ekonomi Islam** :Ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.[13]

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah suatu penelitian

[11]Kemsos, "Program Keluarga Harapan" (Online) tersedia di https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/entas

[13]Apridar, *Teori Ekonomi: Sejarah dan Perkembangannya*, edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 127

ilmiah yang berdasarkan kepada syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadits) tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap upaya membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

H. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, mengungkap tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, serta melihat perbedaannya dengan menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi. Kajian terdahulu yang diambil sebagai sumber dalam penelitian ini adalah:

1. Mila Roza (3214.036) : **Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)**. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode lapangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima dana PKH yaitu dampak positif yang berpengaruh terhadap kesejahteraannya. Dampak tersebut yaitu kebutuhan pendidikan dan kesehatan dari masyarakat penerima PKH terpenuhi yaitu sebesar 3,83 dan 3,75 meskipun ada dari beberapa keluarga yang memiliki jumlah tanggungan yang lebih banyak. Namun, bisa ditanggulangi dengan dana

yang mereka terima. Jadi dengan dana PKH di Nagari Batu Palano berpengaruh terhadap kesejahteraan penerima tersebut.[14]

Pebedaan penelitian:

a) Penelitian terdahulu studi kasusnya Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Sedangkan penulis meneliti di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
b) Objek penelitian terdahulu adalah kesejahteraan masyarakat, sedangkan objek penelitian penulis adalah pengentasan kemiskinan.
c) Jenis penelitian terdahulu adalah penelitian kualitatif, sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian kuantitatif.

2. Rahmi Yusia (3214.056) : **Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (studi kasus peserta PKH di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.** Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 yang merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa besarnya pengaruh pendidikan terhadap peningkatan kesejahteraan KSM hanya sebesar 0,012 atau 12%. Sedangkan PKH bidang kesehatan besarnya pengaruh kesehatan terhadap peningkatan kesejahteraan KSM adalah sebesar 3,530 atau 35,30%.[15]

[14] Mila Roza, *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)*, Skripsi Sarjana pada IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan, 2018,

[15] Rahmi Yusia, *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (studi kasus peserta PKH di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya*, Skripsi Sarjana pada IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan, 2018,

Pebedaan penelitian:

a) Penelitian terdahulu studi kasusnya pada peserta PKH di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan studi kasus penelitian penulis pada peserta PKH di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
b) Objek penelitian terdahulu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, sedangkan objek penelitian penulis adalah pengentasan kemiskinan.

3. Nora Romanda (3214.059) : **Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Nagari Sungai Pua ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.** Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 yang merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PKH memberikan manfaat positif terhadap penanggulangan kemiskinan di Nagari Sungai Pua. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan penelitian dapat dikemukakan bahwa semenjak adanya PKH maka kondisi makanan sehari beserta keluarga sudah mencukupi, anggota keluarga dan masing-masing sudah memiliki pakaian yang berbeda, kebutuhan sekolah anaknya terpenuhi, mudahnya dalam mengakses layanan kesehatan, kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan balita sudah terpenuhi serta pendapatan yang bertambah.[16]

   Pebedaan penelitian:

[16] Nora Romanda, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Nagari Sungai Pua ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana pada IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan, 2018,

a) Penelitian terdahulu studi kasusnya di Nagari Sungai Pua. Sedangkan penulis meneliti di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
b) Jenis penelitian terdahulu adalah penelitian kualitatif, sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian kuantitatif.

4. Nurfadillah (3214.100) : **Pengaruh Efektivitas terhadap Pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Penerima di Kecamatan Mandi Angin Koto Selayan.** Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel bebas yaitu efektivitas (X) berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu peningkatan pendapatan peserta PKH melalui pengelolaan dana dengan cara mendirikan KUBe dan menjadikan dana bantuan PKH sebagai modal awal usaha atau sebagai modal tambahan.[17]

   Pebedaan penelitian:

   a) Penelitian terdahulu studi kasusnya di Kecamatan Mandi Angin Koto Selayan. Sedangkan penulis meneliti di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
   b) Objek penelitian terdahulu adalah pengelolaan dana PKH, sedangkan objek penelitian penulis adalah pengentasan kemiskinan.

5. Kartiawati (1351010145) : **Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari**

[17] Nurfadillah, *Pengaruh Efektivitas terhadap Pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Penerima di Kecamatan Mandi Angin Koto Selayan*, Skripsi Sarjana pada IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan, 2018

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 yang merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas PKH yang di diukur melalui lima indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalam mengelola/mengalokasikan dana PKH yang diterima. Sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kampug Bonglai karena masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh PKH. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga program PKH dapat terlaksana secara efektif.[18]

Pebedaan penelitian:

a) Penelitian terdahulu studi kasusnya pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan. Sedangkan penulis meneliti di

[18] Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)*, Skripsi Sarjana pada IAIN Raden Intan LAMPUNG, 2017

Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

b) Jenis penelitian terdahulu adalah penelitian kualitatif, sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian kuantitatif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang dibagi pada:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang berisi teori-teori yang mendukung tentang pengaruh PKH terhadap pengentasan kemiskinan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pelaksanaan penelitian, uji validitas pengumpulan data, pengujian asumsi klasik, analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian atau kesimpulan apa yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pokok masalah. Kemudian dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut maka diberikan saran yang sekitarnya dapat bermanfaat bagi lembaga yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.[19]

Menurut Sudarwati dalam Kartasasmita, kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.[20]

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.[21]

---

[19]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online) tersedia di https://kbbi.web.id/miskin

[20]Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal. 31

[21]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi, cet. 46, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 319

Kata miskin juga dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran serta dapat pula diartikan dengan orang yang hina dan lemah. Selain itu, kata miskin juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan ada juga yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.[22]

World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi yang dialami penduduk ketika mereka hidup dalam kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan mereka tidak mampu mencapai derajat hidup layak.[23]

2. Indikator Kemiskinan

Dalam menentukan tingkat kemiskinan, lazimnya dikenal dua pendekatan pengukuran (indikator), yaitu rumah tangga miskin (RTM) dan penduduk miskin.Untuk menentukan jumlah RTM, oleh BPS digunakan 14 indikator yang meliputi:[24]

1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m^2 per orang.
2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

[22]Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, Al-Maslahah Volume 13 Nomor 1 April 2017, hal. 75

[23]Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, edisi revisi, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 163

[24] Bambang Istijono dan dkk, *Kredit Mikro Nagari* : *Upaya Melawan Kemiskinan dari Nagari*, (Padang: Bappeda, 2010), hal. 18-19

3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plaster.
4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5) Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak menggunakan listrik.
6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah.
8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000/KK per bulan.
13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14) Tidak memiliki tabunga/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), seperti Sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

3. Penyebab Kemiskinan

Ada tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu:

a. Kemiskinan yang disebabkan *handicap badaniah* ataupun mental seseorang.

Faktor yang pertama merupakan penyebab kemiskinan secara klasik dimana kemiskinan selalu dikaitkan dengan struktur budaya masyarakat setempat, dimana budaya dijadikan sebagai alasan penyebab sekelompok manusia di tempat miskin. Selain budaya yang dituding sebagai biang kemiskinan, faktor klasik lain yang dianggap penting dalam memberikan andil bagi terciptanya kemiskinan diantaranya sifat malas, penyakit, dan cacat fisik.

b. Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam.

Jika kemiskinan timbul karena bencana alam dapat diterima sebagai sebuah kenyataan karena bencana alam memang berakibat rusaknya aset berharga milik masyarakat seperti tempat tinggal, harta benda, dan gagalnya panen.

c. Kemiskinan buatan.

Kemiskinan buatan atau struktural disebabkan beberapa hal yang bersifat struktural, diantaranya:

1) Struktur ekonomi timpang, artinya di dalam struktur ekonomi ada sekelompok kecil orang memiliki kemampuan mendapatkan aset secara berlebihan, sementara di pihak lain banyak anggota

masyarakat yang hanya memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk mendapatkan aset ekonomi.

2) Struktur politik yang menyangkut rendahnya *political will* pemerintah atau rendahnya kualitas kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi negara.[25]

3) Faktor budaya

Menurut Suharto paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

a. Faktor individual, dimana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin.
b. Faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan.
c. Faktor kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas untuk bekerja dan berusaha.
d. Faktor struktural, dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi. Orang menjadi miskin akibat dimiskinkan oleh sistem yang ada.[26]

[25]Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, edisi 1, cetakan 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 797-801

[26]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi revisi, Cet 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) hal. 70

4. Pembagian Kemiskinan

Menurut Baswir dan Sumodiningrat, secara sosioekonomis terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu:[27]

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan dimana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, dan pengeluaran konsumsi.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya.

5. Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah

[27] Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, edisi 1, cetakan 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 795-796

mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut:

a. Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

c. Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya

dengan memberikan modal atau pembiyayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam menganggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah PKH yang berupa bantuan tunai bersayarat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.[28]

B. Kemiskinan dalam Islam

1. Pengertian Kemiskinan

a. Kemiskinan menurut al-Qur'an dan Hadis

Kata fakir menunjukkan kepada seseorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Menurut bahasa, kata *faqrun*, maknanya adalah hal yang lepas dari segala sesuatu, baik bagian dari anggota tubuhnya ataupun yang lainnya. Ibnu Faris berkata; "*fa, qaf* dan *ra* merupakan huruf asli dan sahih yang menandakan pada hal yang lepas dari sesuatu, baik itu dari bagian anggota tubuh ataupun yang lainnya. Jadi, *faqir* adalah patah tulang-tulang punggungnya. Para ahli bahasa berkata; kata *faqir* diambil dari *faqrun*, seakan-akan orang fakir adalah orang yang patah tulang punggunya karena tergelincir dari kehinaan dan kemiskinannya.

[28]TNP2K, Program Penanggulangan Kemiskinan, (On-line) tersedia di: http://www. tnp2k.go.id/id/ program /sekilas/

Dalam al-Quran sendiri terdapat 8 ayat yang mengandung kata *fakir* (baik dalam bentuk tunggal maupun jamak).[29]

Kata Miskin asal katanya adalah *as-sakan*, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata; "Huruf *sin*, *kaf* dan *nun* adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatakan, '*Sakana asy-syai'u yaskunu sukunan sakinan*. Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat geraknya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia. Dalam al-Quran sendiri terdapat 33 ayat yang mengandung kata miskin (baik dalam bentuk tunggal maupun jamak), dimana sebagian besar berasal dari kata dasar *as-sakan* (sebanyak 27 ayat).[30]

[29] Bayu tri Cahya, *KemisKinan Ditinjau Dari PerPeKstif al-Quran Dan HaDis*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hal.45

[30] Bayu tri Cahya, *KemisKinan Ditinjau Dari PerPeKstif al-Quran Dan HaDis*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hal.46-47

b. **Kemiskinan menurut ulama**

1) Mazhab Hanafi.

Sarakhsi, ulama mazhab Hanafi dalam bukunya *al-Mabsūṭ,* menyebutkan miskin adalah orang yang meminta-minta. Sebutan miskin juga diberikan dengan orang yang memiliki kecacatan, (bila dia) tidak meminta-minta maka (orang lain) tidak memberi kepadanya. Lebih lanjut Sarakhsi menerangkan bahwa miskin lebih sengsara keadaannya dibandingkan fakir. Fakir masih memiliki sesuatu meskipun tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin tidak memiliki sesuatu apapun. Terdapat beberapa dalil yang dijadikan sebagai hujjah, yaitu Surat al-Insan ayat 8, yang artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan". Selanjutnya adalah surat al-Balad ayat 16, yang artinya: "Atau orang-orang miskin yang sangat membutuhkan".

Ulama tafsir menjelaskan bahwa miskin yang terdapat dalam ayat 8 surat al-Insān adalah miskin. Sedangkan ayat 16 surat al-Balad menunjukkan kepada orang yang sangat merana hidupnya. Kulitnya dipenuhi debu karena pekerjaan berat yang dikerjakannya. Perutnya selalu dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian. Miskin dalam keadaan seperti ini dapat dikatakan

tidak memiliki sesuatupun. Kondisi ini menunjukkan betapa orang miskin itu sangat sengsara hidupnya.

2) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, "miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun". Rumusan ini sama dengan rumusan menurut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, ukuran terpenuhi kebutuhan adalah makanan pokok, bukan kebutuhan pokok secara umum. Untuk mengukur kebutuhan mencukupi selama satu tahun tentu harus memiliki penghasilan, baik harian, bulanan maupun tahunan atau lainnya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Miskin dapat disebut sebagai gelandangan yang tidak memiliki makanan dan tempat tinggal. Untuk menguatkan pendapat ini, mazhab ini tidak mencantumkan dalil, baik nas maupun logika, sehingga tidak diketahui secara pasti dasar pijakan mereka. Penulis menduga, penetapan makna miskin dalam mazhab Maliki hanya bertumpu kepada pemahaman bahasa semata.

3) Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali

Menurut ke dua mazhab ini, miskin adalah: orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi. Miskin adalah orang mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya, bisa jadi hanya mendapatkan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) atau Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu) yang dibutuhkannya. Ukuran mencukupi kebutuhan menurut kedua mazhab ini tidaklah tentu. Seseorang disebut mampu mencukupi kebutuhannya (kaya) apabila ia telah mencukupi kebutuhannya. Ia tidak ditetapkan dengan memiliki uang sejumlah Rp. 50.000,- atau lebih atau dalam bentuk lain, seperti modal usaha dan binatang ternak atau tanaman yang telah sampai nisab. Walaupun nilainya banyak sedangkan semua itu belum mencukupi, tidaklah disebut mencukupi kebutuhannya (kaya). Jadi ukuran kaya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya.[31]

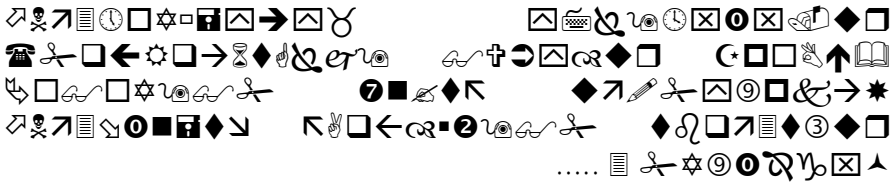
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Manusia miskin bukan karena faktor fitrah manusia, tetapi ada penyebab yang mempengaruhi manusia menjadi miskin. Diantaranya sebagai berikut :

a) Sistem Monopoli

Monopoli dan ketidakadilan dalam distribusi bahan pokok kesejumlah wilayah menjadi salah satu faktor manusia miskin. Orang miskin menjadi sasaran konsumen bagi orang kaya dan orang miskin menjadi sasaran pembelajaran dan percobaan barang konsumsi, bahkan distribusi bahan pokok tidak merata kepada orang miskin. Hal ini telah diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143:

[31] Analiansyah, *Miskin dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir*, (Online) tersedia di http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2404

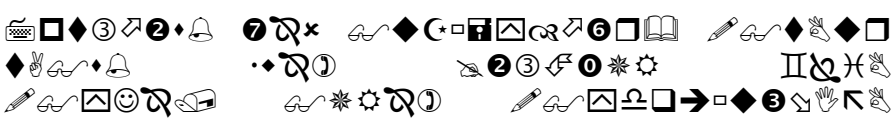


Artinya "*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*"

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan manusia yang rakus dan semena-mena dalam distribusi bahan pokok menjadi penyebab kemiskinan di sejumlah wilayah, termasuk di wilayah Indonesia. Sirkulasi dan distribusi kekayaan perlu diawasi dan dikontrol agar standar pemenuhan dan kecukupan kebutuhan bahan pokok tercukupi, sehingga keadilan yang dimaksud menjadi kenyataan. Islam melarang monopoli dan sikap pilih kasih, karena terjadinya persaingan harga pada barang konsumsi dan produksi yang mengakibatkan kesengsaraan pada masyarakat umum.

b) Sikap berlebihan dan pola hidup mewah

Sikap berlebihan dan boros dalam menjalani hidup merupakan sikap yang tidak benarkan dalam Islam. Bersikap sombong dan pamer kekayaan, serta bermewah-mewahan merupakan tindakan yang kurang etis. Sikap tersebut sering menyebabkan terjadi ketimpangan antara miskin dan kaya. QS. Saba' ayat 34-35:





Artinya: 34. *(Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata) yakni para pemimpinnya hidup bergelimang dengan kemewahan, ("Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya.")*

35. *Dan mereka berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab.*

Perilaku yang tidak benar akan mengakibatkan perilaku yang kurang sehat, begitu sebaliknya perilaku yang baik mengandung kerja yang baik dan dianggap investasi yang benar-benar menguntungkan. Islam senantiasa menganjurkan orang–orang agar beriman dan berprilaku baik dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Disamping mendapatkan ampunan dan anugerah Allah, prilaku baik juga mampu berikan keberkahan bagi lingkungan sekitar dan masyarakat umum.

c) Riba dan Bunga

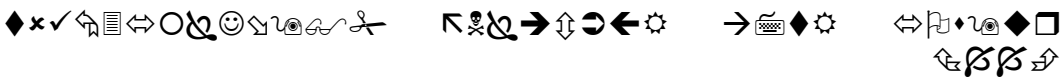
Tindakan dan perbuatan riba adalah tindakan yang dilarang oleh Islam dan merupakan salah satu penyebab kemiskinan di masyarakat. Hal ini karena riba adalah perbuatan yang menguntungkan satu orang saja, dan merugikan pihak lain. Tindakan riba sangat ditentang dalam Islam karena membuat masyarakat sengsara, hal ini sama halnya dengan bunga bank yang diterapkan di Indonesia.

3. Cara MenangguIangi Kemiskinan

Beberapa kemungkinan yang dapat menanggulangi kemiskinan yang merupakan konsep Islam sebagai berikut:[32]

a. Pemberian Makanan

Dasar dari pemberian makanan ini adalah jawaban dari orang-orang yang berdosa dalam Q.S Al-Muddatsir ayat 44



Artinya: "*Dan kami tidak memberi makan terhadap orang miskin*."

Hal tersebut menunjukkan bahwa memberi makan kepada orang miskin termasuk salah satu alternatif dalam rangka memikirkan dan menanggulangi kemiskinan itu. Pemberian makanan kepada orang miskin dengan cara memberi makanan yang disukai dari orang yang memberi itu. Dengan kata lain seseorang yang memberi makanan kepada orang miskin tidak sekedar memberi makanan seenaknya, namun sesuai dengan apa yang ia sukai. Jadi kalau ada seseorang yang memberi makanan kepada orang miskin hanya karena layu atau sudah busuk, sehingga makanan tersebut diberikan hanya karena ia sendiri tidak suka tidak dibenarkan oleh agama.[33]

[32]Budihardjo, "*Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an*". Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 6, Nomor 2, Juli-Deseniber 2OO7, hlm.286-299

[33]Budihardjo, "*Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an*". Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 6, Nomor 2, Juli-Deseniber 2OO7, hlm.286-299

Dasar ketentuan ini adalah Q.S Al-Insan ayat 8:



Artinya: "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin.*"

Untuk menggalakkan kebaikan dalam rangka memberi makan kepada orang-orang miskln, Islam memberikan konsep perlu adanya dorongan dan anjuran untuk terlaksananya pemberikan makan kepada orang-orang miskin.[34]

b. Infak

Infak termasuk salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Dasarnya adalah Q.S al-Baqarah ayat 177:



Artinya: *"...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin,.."*

c. Fidyah

Membayar fidyah merupakan kewajiban bagi orang yang wajib berpuasa di bulan suci Ramadhlan tetapi tidak berkuasa menjalankan puasa sehingga membayar fidyah itu menjadi salah satu alternatif untuk menganggulangi kemisikinan. Sebagai dasarnya adalah Q.S al- Baqarah ayat 184:



Artinya: "*..dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin*."

Pemberian makanan kepada seorang miskin ini sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban berpuasa dengan memberi makan kepada seorang miskin karena memang tidak mampu. Yang dimaksud orang yang tidak mampu dalam ayat tersebut, menurut Muhammad Rasyid Ridha adalah orang-orang yang mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi seperti: lanjut usia, kelemahan yang dibawa sejak lahir, tugas-tugas berat yang berlangsung terus-menerus, penyakit yang berat yang harapan untuk sembuh sangat sulit diharapkan, dan termasuk dalam kategori ini adalah wanita hamil dan menyusui. Mereka itu diperkenankan untuk tidak melaksanakan puasa daIam bulan Ramadhlan dan wajib memberi makan kepada orang miskin.

d. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab Negara ini pada masa Rasulullah saw. bisa diqiyaskan pada ghanimah. Dasar bahwa ghanimah atau harta rampasan merupakan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan adalah Q.S al-Anfal ayat 41:



Artinya: "*Ketahuilah bahwasannya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya*

seperlima untuk Allah SWT., Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil...."

e. Pemberian sebagian Warisan

Pembagian warisan yang dimaksud di sini adalah jika terjadi pembagian warisan diantara umat ada orang-orang miskin yang hadir, 292 dianjurkan untuk memberi kepada mereka sekedarnya.

Dasarnya adalah Q.S an-Nisa' ayat 8:



Artinya: " *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*

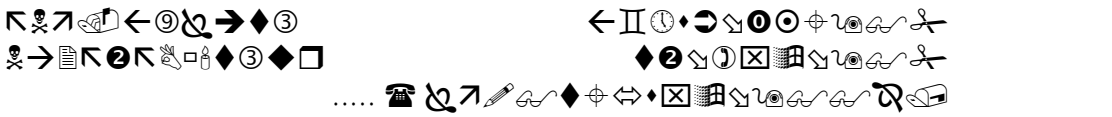
f. Zakat

Orang yang menunaikan zakat itu untuk membersihkan dan mensucikan harta yang telah dianugerahkan kepadanya dan tidak akan menjadikan miskin bagi orang yang menunaikan zakat itu, namun justru hartanya dapat bertambah dan berkembang atas izin Allah, setidak-tidaknya dengan orang yang dizakati hubungannya akan bertambah baik dan pahala di akhirat akan bertambah pula.[35]

4. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

[35]Budihardjo, "*Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an*". Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 6, Nomor 2, Juli-Deseniber 2OO7, hlm.286-299

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al- Baqarah: 268:



Artinya: *"Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)"*

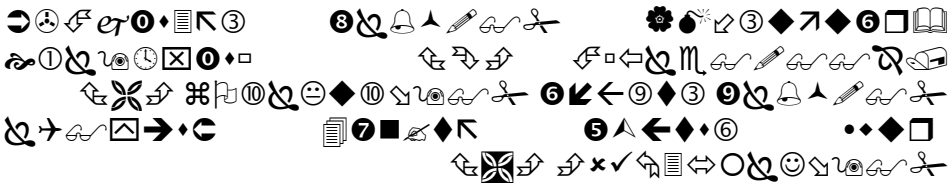
Dengan demikian, siapapun dan dimanapun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) nya, yaitu sandang, pangan dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin.[36]

Islam sangat memandang penting permasalahan kemiskinan ini karena kefakiran akan menyebabkan lemahnya iman. Rasulullah SAW sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga beliau dalam pengelolaan keuangan Negara menggunakan prinsip langsung menyalurkan semua dana yang dimiliki kepada para mustahik sampai habis tanpa menyisakannya. Kebijakan anti kemiskinan pun turut dianut

[36]Fika Fitriasari, *Sinergi Ekonomi Islam untuk Menanggulangi Kemiskinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016, hal. 52-54

oleh para Khulafaur Rasyidin yang merupakan penerus perjuangan Rasulullah SAW, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada masa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan umat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan pembangunan Negara.

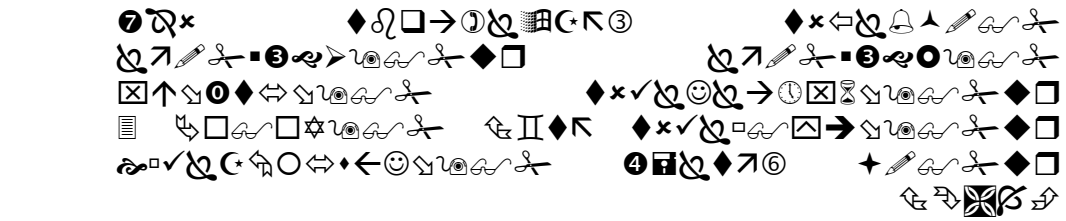
Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka Al-Qur'an menyebut mereka sebagai para pendusta agama (QS. Al-Ma'un: 1-3):



Artinya: 1. *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?*
2. *Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,*
3. *dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.*

Islam juga menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena faktor malas. Orang miskin yang malas berusaha sangat dikecam dalam ajaran Islam. Orang yang suka meminta-minta karena malas bekerja, dalam sebuah hadits Rasul SAW, akan kehilangan wajahnya di hari kiamat nanti. Justru Islam mengajarkan kepada orang miskin untuk

juga mau berinfak, meski dengan jumlah yang sangat sedikit (QS. Ali Imran: 134):[37]



Artinya : "*(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*."

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama.

Menurut al-Maududi untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan digunakan dan diterapkan yaitu sistem ekonomi Islam dengan

[37]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi revisi, Cet 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) hal. 73

karakteristik sebagai berikut:Berusaha dan bekerja; Larangan menumpuk harta; Zakat; Hukum waris; Ghanimah; Hemat.[38]

5. Solusi Ekonomi Syariah terhadap Kemiskinan

Ekonomi Islam memandang kekayaan alam dan kekayaan SDM harus dilakukan atau diinvestasikan untuk kepentingan manusia pada masa depan, bukan untuk diperjualbelikan. Islam menganjurkan manusia untuk berinvestasi, berdagang dan berbisnis, bukan untuk menjadi buruh dan pekerja kasar. Islam juga memudahkan segala sumber rejeki baik dari sumberdaya alam, maupun dari sumber daya manusia, karena pada hakikatnya rejeki dan kekayaan itu datangnya dari Allah bukan karena manusia. Ekonomi mendorong agar manusia bersikap rendah hati, *tawadlu'*, kerja keras, tidak boros dan menjauhi perbuatan buruk yang menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu, ekonomi islam menganjurkan agar kemiskinan terhindar, maka ada dua langkah yang harus dilakukan :

a. Mengembangkan sumberdaya manusia untuk kepentingan masa depan kehidupan, termasuk sumberdaya alam.
b. Mengharuskan manusia mentaati aturan Allah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunah, dimana aturan tersebut menjadikan manusia bahagia di dunia dan akherat.

Unsur utama dalam ekonomi Islam mencapai derajat kaya adalah:

[38]Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, edisi 1, cetakan 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 23-25

a. Memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan SDM untuk masa depan.
b. Memiliki sikap jujur, adil dan tidak boros dalam menjalani hidup sehingga kita bisa kaya.
c. Berinvestasi dengan cara berdagang, bisnis, dan jual beli secara halal, juga suka berderma untuk kepentingan umum agar bisa mengurangi kemiskinan.
d. Menghindari transaksi yang bernuansa ribawi dan bunga, karena akan menyengsarakan peminjam.

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa solusi kemiskinan adalah mempunyai badan yang sehat jasmani dan rohani. Mempunyai rencana atau pandangan hidup di masa depan. Ketiga, pemenuhan kebutuhan hidup yakni pakaian dan makanan pokok.[39]

C. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Ekonomi islam

Di dalam ekonomi Islam kesejahteraan disebut juga dengan kemaslahatan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dari pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang matrealitis.

[39] Hamdani, *Kemiskinan dalam Pandangan Ekonomi Syariah*, Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencangkup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara.
b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
c. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir.
d. Kesamaan hak dan peluang.[40]

Kesejahteraan menurut ekonomi Islam tidak boleh mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum yang menyangkut persoalan-persoalan moral, pendidikan agama, dan sebagainya, berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mengukur kesejahteraan ekonomi dari segi materi semata.[41]

Kesejahteraan dalam Pandangan Islam Pendefenisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang kompherensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencangkup dua pengertian yaitu:

[40] Wijayanto dan Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia.* Hal 336

[41] Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015) hal 75

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencangkup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagian haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa lebih bahagia jika terdapat keseimbangan antara individu dengan lingkungan sosialnya.

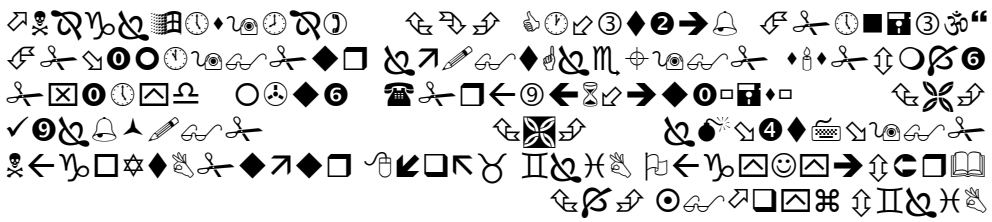
b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup dialam dunia saja, tetapi juga dialam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukkan dalam rangka untuk memenuhi kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan abadi yang lebih bernilai *(valuable)* dibandingkan kehidupan dunia.[42]

2. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Konsep Kesejahteraan Dalam Islam Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian konsep dan defenisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan

[42]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta *Ekonomi Islam*. (jakarta: Raja grafindo Persada. 2008). Hlm 4-5

dalam QS Al-Quraisy: 1-4 merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian.



Artinya: *1) karena kebiasaan orang-orang Quraisy,*

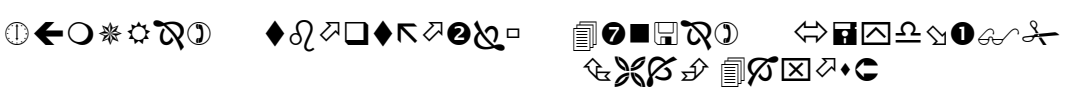
2) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas

3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah)

4) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama yaitu:

a. Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejatinya tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah Swt. Penentangan terhadap aturan Allah Swt, justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia seperti dalam QS. Thaha: 24 yang berbunyi:



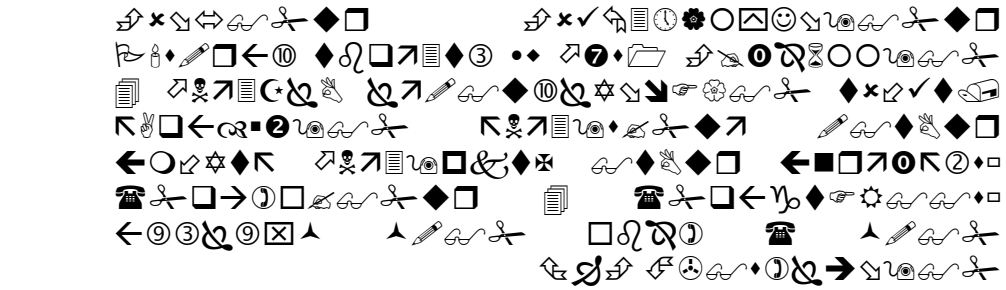
Artinya: *"Pergilah kepada Fir'aun; Sesungguhnya ia telah melampaui batas".*

b. Kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

c. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak dipenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dsar ini adalah sebagian besar masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa.

Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam memegang kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7 yang berbunyi:



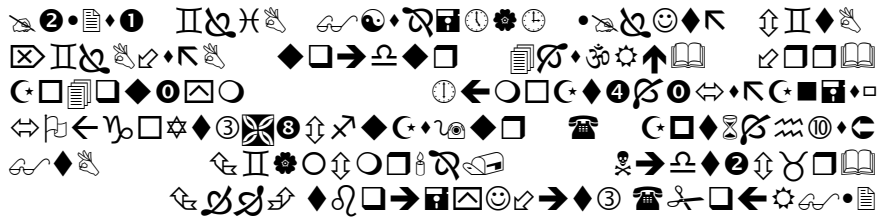


Artinya: *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya"*

d. Kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.

3. Dasar Hukum Kesejahteraan dalam Al-Qur'an

a. Qs. An Nahl: 97



Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan*

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan"

Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat diatas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik.

Ada juga pendapat yang menyatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai dengan memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt.

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tidak memandang bagaimanapun keadaan orang tersebut.

b. Qs. At- Takatsur: 1-2



Artinya: *(1) Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu,*
(2) Sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Maksudnya: Bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan. Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indicator kesejahteraan seperti

tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan.

Yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan pada kemewahan hendanik dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental).[43]

4. Meningkatkan Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Al Ghazali merumuskan tiga alasan kenapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, yaitu:

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
b. Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga.
c. Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah *al-Mashlahah*.[44]

[43] Amirus Sodiq, "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*", Jurnal STAIN Kudus, (02 Desember 2015) Hal 392-394

[44] Amirus Sodiq, "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*", Jurnal STAIN Kudus, (02 Desember 2015), Hal 389

Adapun menurut islam konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia *(falah)* dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat *(al-hayah al-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam islam tidak hanya mencangkup hal materi saja melainkan dalam hal ruhaniah.

Menurut Imam Al-Ghazali dalambukunya *ihya' ulumuddin* dalam masyarakat islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat islam atau yang disebut dengan *maqasid syariah* diantaranya adalah:

a. Agama
b. Hidup atau jiwa
c. Keluarga atau keturunan
d. Harta atau kekayaan
e. Intelek dan akal

Untuk mencapai sebuah kesejateraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi. Alasan kenapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi:

a. Untuk mengetahui kebutuhan hidup yang bersangkutan
b. Mensejahterakan keluarga
c. Membantu orang lain yang membutuhkan

Dari ketiga kriteria diatas membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi

dimana dalam hal ini lebih difokuskan pada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhan dalam harta benda.

Berikut merupakan tingkatan kebutuhan dalam Islam:

a. *Daruriyah,* terdiri dari seluh aktivitas yang berkaitan dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.
b. *Hajiyah,* terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak penting bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tersebut tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
c. *Tahsiniah*, atau *tazyniat*, secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.[45]

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi

[45] Lailatun Nafiah, *"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik"*, Journal Of Islamic Ekonomic And Business, 2015. Hal 937

kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.[46]

2. Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Dasar Pelaksanaan

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007

[46] Kemsos, *Program Keluarga Harapan*, (Online) tersedia di : https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan

2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
3. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
4. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
5. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

4. Tujuan PKH

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Program Keluarga Harapan bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

5. Sasaran PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

6. Kriteria Komponen

Kriteria komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
    a) Ibu hamil/menyusui; dan
    b) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
    a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat

b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
c) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat
d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
   a) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
   b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

7. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan Sosial PKH
2. Pendampingan PKH
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

1. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
4. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

8. Pemenuhan Kewajiban

Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajiban kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel

Tabel 2.1
Ketentuan Penangguhan/Penghentian Bantuan PKH

Ketentuan Penangguhan	Ketentuan Penghentian

1. Peserta PKH ditangguhkan bantuannya pada tahap 1, 2, dan 3 apabila tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan minimal 1 bulan dalam siklus penyaluran bantuan. 2. Penangguhan bantuan sosial PKH tahap 4 diberlakukan pada tahap 1 tahun berikutnya. 3. Peserta PKH menerima kembali bantuan sosial PKH yang ditangguhkan apabila memenuhi kewajiban.	1. Peserta PKH dihentikan kepesertaannya jika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebanyak 3 tahap penyaluran bantuan selama masa kepesertaan. 2. Peserta PKH yang dihentikan kepesertaannya akan menerima bantuan sosial PKH yang telah ditangguhkan tahap-tahap sebelumnya.

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019

9. Besaran Bantuan PKH

Besaran bantuan PKH pada setiap kompenen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH berdasarkan keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Indeks dan Komponen Bantuan Sosial PKH

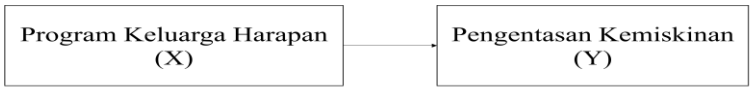
NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN (Rp)
BANTUAN TETAP SETIAP KELUARGA		
1	Bantuan Tetap PKH Reguler	550.000
2	Bantuan Tetap PKH Akses	1.000.000
BANTUAN KOMPONEN SETIAP JIWA		
1	Bantuan Komponen Kesehatan Ibu Hamil	2.400.000
2	Bantuan Komponen Anak Usia 0 s.d 6 Tahun	2.400.000
3	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SD/Sederajat	900.000
4	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SMP/Sederajat	1.500.000
5	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SMA/Sederajat	2.000.000
6	Bantuan Komponen Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000
7	Bantuan Komponen Lanjut Usia 60 Tahun ke Atas	2.400.000

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Program keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memutus mata rantai kemiskinan, sehingga dengan dilaksanakannya PKH diharapkan penduduk miskin bisa dikurangi atau bahkan dihapus. Dalam kerangka pemikiran di atas penulis mencoba untuk menguraikan apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) (X) akan berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y).

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang diajukan. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dibawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 : PKH tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

H1 : PKH berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Di mana metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.[47] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah

[47]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hal. 97

antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan (korelasi) atau tidak.[48] Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada peserta PKH Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah dilakukan di Kenagarian Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota**.** Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai selesai.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[49] Dalam hal ini penulis dapat mengambil data dari berbagai sumber seperti: buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penulisan. Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

[48] Zaenal arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Lentera cendikia, 2009) hal. 17

[49] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hal. 129

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.[50] Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang didapatkan langsung dari masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung dikumpulkan oleh pihak yang berkepentingan, biasanya data sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain, bisa melalui majalah, jurnal, koran atau publikasi lainnya.[51]

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, tumbuh-tumbuhan dan peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian.[52]

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penerima PKH di Nagari Maek. Menurut para pendamping PKH Nagari Maek, terdapat 716 RTSM yang menerima bantuan PKH. Karena penulis

[50] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93

[51] I'anatut Thoifah, *Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*, (Malang: Madani, 2015), hal. 38

[52] Herman Resito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama:, 1992) hal. 49

membatasi penelitian pada komponen pendidikan dan kesehatan, maka KPM yang memiliki komponen pendidikan dan kesehatan berjumlah sebanyak 621 KPM dan sebanyak 95 merupakan KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial.

2. Sampel

Sampel adalah sebagaian dari populasi atau wakil dari populasi.[53] sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka pene;iti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari poopulasi harus betul-betul *representative* (mewakili).[54] Untuk mengetahui jumlah besaran dari populasi yang akan diteliti, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{621}{1 + 621\ (0{,}10)^2}$$

$$n = \frac{621}{7{,}21} = 86{,}13$$

[53] Syaifuddin Azwar , *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hal. 79

[54] Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hal. 84

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah peserta PKH tahun 2018 adalah 621 KPM. Dengan menggunakan rumus slovin terdapat jumlah sampel yang akan diteliti yaitu sebanyak 86 KPM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Valid atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada jenis pengumpulan data yang dipergunakan untuk pemilihan metode yang tepat sesuai dengan jenis dan sunber data yang dalm penelitian. Tehnik pengumpulan data adalah upaya untuk mengamati variabel yang di teliti, metode yang penulis gunakan untuk menghimpun data dilokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

   Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Kuesioner ini dibuat berdasarkan

indikator-indikator efektivitas Program Keluarga Harapan dan indikator pengentasan kemiskinan.

2. Interview (wawancara)

Interview adalah salah satu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[55] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yangnharus diteliti, dan juda apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.[56]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa, catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[57]

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip tersimpan yang terkait dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan agar dapat memperkaya teori,

[55] Marzuki, *Metodologi Research*, Fakultas Ekonomi, (Yogyakarta: Cet, 1983), hal. 83

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&G)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.137

[57] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hal. 236

pendapat serta pemikiran terkait pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

F. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini memberlakukan dua jenis variabel yang menjadi obyek penelitian, yaitu:

a. Variabel Terikat (*Variable Dependen*)

Variabel terikat atau sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.[58]

Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Pengentasan Kemiskinan. Pengentasan kemiskinan yang akan diteliti adalah mengenai pengaruh dari Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Variabel Bebas (*Variable Independen*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).[59] Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&G)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 59

[59] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&G)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 59

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana, alat uji ini bertujuan untuk mengetahui dua variabel antara variabel independen X dengan variabel dependen Y yang akan dikenai prosedur analisis statistik regresi apakah menunjukkan hubungan yang linear atau tidak. Untuk keabsahan data maka sebelumnya data yang diperoleh dari lapangan akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji berikut ini:

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur apa yang akan diukur atau dengan kata lain apakah alat ukur tersebut

telah tepat untuk mengukur objek yang akan diteliti.[60] Suatu angket dinyatakan valid apabila angket itu dapat mengukur sesuatu dengan cara menghitung korelasi masing-masing pernyataan dengan skor total dan menggunakan rumus teknik korelasi produk moment.

$$\mathbf{rxy} = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(N \sum x2 - (\sum x)2)(N \sum y(\sum y)2}}$$

Keterangan:

rxy	:	Kooefesien korelasi untuk variabel X dan Y
N	:	Jumlah responden
$\sum x$	:	Jumlah skor butir soal
$\sum y$	:	Jumlah skor total
$\sum x2$	:	Jumlah skor kuadrat butir soal
$\sum y2$	:	Jumlah skor total kuadrat butir soal

Kriteria penilaian :

a) Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid.

b) Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesiner tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu hal yang dapat dipecaya untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan, sehingga angket tersebut dapat dihandalkan untuk mengukur variabel penelitian. Dalam penelitian ini reliabel dan tidak reliabel suatu variabel menggunakan *cronbach alpha*. Dikatakan reliabel jika

[60] Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 146

memiliki nilai *Cronbach alpha* lebih dari r tabel, apabila nilai *Cronbach alpha* lebih kecil dari r tabel berarti angket atau kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian.[61]

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menginginkan model yang dihasilkan mempunyai nilai residual yang menyebar normal atau dengan kata lain untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. untuk mengetahui normal atau

[61] Agus Tri Basuki Dan Nano Prawato, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Dengan Aplikasi Spss & Eviews),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hal. 57

tidaknya sebaran data, data dikatakan berdistribusi normal jika signifikan > 0,05, sebaliknya jika nilai signifikannya < 0,05 maka seberannya dinyatakan tidak normal.[62]

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi di antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika d < dL atau d > (4-dL) hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2) Jika dU < d < 4-dU, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi
3) Jika dL< d < dU atau (4-dU) < d < (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan.[63]

c. Uji Heteroskedastisitas

[62] Yudi Mahadianto dan Adi Setiawan, *Analisis Parametrik Dependensi dengan Program SPSS untuk Pengolahan Data Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 57-63.

[63] Agus Tri Basuki Dan Nano Prawato, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Dengan Aplikasi Spss & Eviews)*…,hal. 60.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman, yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas.

1) Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka persamaan dalam model regresi tersebut mengandung Heteroskedastisitas.
2) Sebaliknya jika signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti Homoskedastisitas

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Bila skor variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel

bebasnya. Model dari regresi sederhana yang ditujukan untuk melakukan prediksi nilai variabel dependen (Y) dengan menggunakan satu variabel independen (X). Persamaan dalam regresi sederhana adalah sebagai berikut: $Y=a+bX$

Keterangan:
Y: Pengentasan Kemiskinan
X: Program Keluarga Harapan (PKH)
a: Nilai konstanta
b: koefisen regresi

4. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.[64] Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai koefisien determinan yang mendekati 1 berarti variabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Ada dua sifat R^2 yang bisa dicatat:

1) R^2 bukan merupakan besaran negatif
2) Batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika R^2 sebesar 1 (satu) berarti "kecocokan sempurna" atau variabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika R^2 sebesar 0 (nol) berarti tidak ada hubungan sama

[64] Sri Mulyono, "Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis (edisi ketiga)", (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2006), h.259

sekali antara Y dan X atau kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

Konsep koefisien determinasi dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{n(a\sum Y + b_1\sum x1\ Y + b_2\sum x2\ Y + b_3\sum x3\ Y) - (\sum Y)^2}{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2}$$

Keterangan

R^2	:	Koefisien determinasi
N	:	Jumlah sampel
A	:	Konstanta
A	:	Konstanta
b_1, b_2, b_3	:	Kooefesien regres
$\sum Y$	:	Jumlah Y
$\sum Y2$	:	Jumlah Y^2
$\sum X_1 Y \ldots, \sum Y_s Y$	:	Jumlah X1 Y sampai Xs Y.[65]

5. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang didefensikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternative. Hipotesis alternatif sering disebut juga hipotesis penelitian. Hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diterima kecuali bahwa data yang kita kumpulkan salah. Hipotesis alternative akan diterima hanya jika data yang kita kumpulkan mendukungnya. Biasanya hipotesis nol

[65]Agus Tri Basuki Dan Nano Prawato, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Dengan Aplikasi Spss & Eviews)*…,hal. 14-16

dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternative dengan Ha atau H1. Karena penelitian ini bersifat linear sederhana maka dilakukan uji hipotesis dengan uji T.[66]

a. Uji T (Koefisien Regresi)

Uji T merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak.Uji t digunakan dalam pengujian statistik untuk melihat apakah variabel *independent* secara individu berpengaruh terhadap variabel *dependent.* Uji t dirumuskan

$$t0 = \frac{b - B0}{Sb}$$

Keterangan:
B_0 : Mewakili nilau B tertentu, sesuai hipotesisnya.
S_b : simpangan baku koefisien regresi b.

Untuk melihat pengaruh dari X dan Y dilakukan uji T sebagai berikut dengan kriteria pengujian:

1) Jika t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel, H0 ditolak, Ha diterima. Artinya Xi (variabel-variabel bebas pada persamaan) berarti berpengaruh nyata terhadap Y (*variabel dependent*/variabel tidak bebas).
2) Jika t hitung < t tabel, atau t hitung > t tabel, maka H0 diterima, Ha ditolak, artinya Xi (variabel-variabel bebas pada persamaan) tidak berpengaruh nyata terhadap Y (variabel tidak bebas).

[66]Ety Rochaety Dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSSS*. (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2007). Hal. 104.

3) H0 : bi, H0 diterima (t hitung < t tabel) artinya *variabel independent* secara persial tidak berpengaruh terhadap *variabel dependent*. Ha : bi ≠ 0 Ha diterima (t hitung > t tabel) artinya *variabel independent* secara persial berpengaruh nyata terhadap *variabel dependen*.[67]

Untuk uji statistiknya sebagai berkut:

1) Menentukan formulasi hipotesisnya
   a) $H_0 : B = B_0$ (tidak ada hubungan positif antara X dan Y)
   b) $H_1 : B > B_0$ (ada hubungan positif antara X dan Y)
   c) $H_0 : B < B_0$ (tiadak ada hubungan positif antara X dan Y)
   d) $H_1 : B \neq B_0$ (ada hubugan positif antara X dan Y)

2) Menentukan taraf nyata (α)
   a) Taraf nyata yang digunakan biasanya 5% (0,05) atau 1% (0,01) untuk uji satu arah dan 2,5% (0,25) atau 0,5 (0,005) untuk uji dua arah
   b) Nilai t tabel memiliki derajat bebas (db) = n – 2 $t_{\alpha;n-2}$ = …..atau $t_{\alpha/2;n-2}$ =……

3) Menentukan kiteria pengujian
   a) Untuk H_0 : tidak ada hubungan positif antara X_i dan Y

      H_1 : ada hubungan positif antara X_i dan Y

[67] Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, (Yogakarta: CV Andi OFFSET, 2006), Hal. 12.

H_0 : diterima (H1 ditolak) apabila $t_0 \leq t_\alpha$

H_0 : ditolak (H1 diterima) apabila $t_0 > t_\alpha$

b) Untuk H_0 : tidak ada hubungan negatif antara X_i dan Y

H_1 : ada hubungan negatif antara X_i dan Y

H_0 : diterima (H0 ditolak) apabila $t_0 \leq t_\alpha$

H_0 : ditolak (H1 diterima) apabila $t_0 > t_\alpha$

c) Untuk H_0 : tidak ada hubungan negatif antara X_i dan Y

H_1: ada hubungan negatif antara X_i dan Y

H_0 : diterima (H_i ditolak) apabila $t_{\alpha/2} \leq t0\ t \leq t_{\alpha/2}$

H_0 : ditolak (H_i diterima) apabila $t_0 > t_\alpha$ atau $t_0 \leq - t_{\alpha/2}$

4) Menentukan nilai uji statistik (nilai t_0) dan membuat kesimpulan H_0 diterima atau ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Maek

1. Sejarah Nagari Maek

Konon pada masa dahulu penduduk Maek berasal dari bangsa India yang melakukan perjalanan ke arah Aceh, dari Aceh mereka menuju Batang Kampar. Sesampai di Batang Kampar mereka terus menyusuri aliran sungai yang mengarah ke hulu sungai. Kemudian mereka mencari suatu perkampungan untuk ditempati. Dalam perjalanan

tersebut mereka mendapati sebuah sungai yang banyak ikannya hal ini dibuktikan karena setiap benda yang dibuang ke sungai selalu dimakan oleh ikan, sehingga mereka menyebut ikan tersebut dengan sebutan "Maek" dalam bahasa tamil artinya "rakus".perkampungan inilah yang kemudian mereka tempati yang kemudian menjadi kenagarian Maek. Dan dari mereka inilah yang kemudian membuat menhir sebagai tempat pemujaan.[68]

Secara administrasi pada masa penjajahan Belanda sampai pada akhir tahun 70 an yaitu masa pertukaran sistem pemerintahan nagari kepada pemerintahan desa dan pada awal tahun 80 an nagari Maek dibagi menjadi 5 buah desa yaitu Desa Tigo Sakato, Desa Paruso, Desa Ronah, Desa Koto Tinggi dan Desa Nenan. Namun, secara wilayah adat tetap dinamakan Maek. Pada tahun 2001, 5 buah desa tersebut disatukan kembali dan dibentuklah pemerintahan Nagari Maek.

Tentang sejarah adat di Maek terdapat rajo adat dan rajo ibadat. Adapun sejarah rajo adat dan rajo ibadat yang ada di Maek sekarang ini adalah dahulunya datangnya dari Batu Sangkar yang mengutuskan dua buah raja Maek yaitu raja adat dengan gelar Dt. Bandaro atau Dt. Inyiak, sedangkan rajo ibadat dengan gelar Dt. Rajo Dirajo. Dari 2 orang rajo ini membawahi 6 pucuak suku/koto yakni Suku Piliang, Suku Melayu, Suku Domo, Suku Mandailiang, Suku Pitopang dan Suku Kampai.[69]

---

[68] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

[69] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

Nagari Maek berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 12 Jorong, yaitu:

Tabel 4.2
Nama Jorong di Nagari Maek

No	Jorong	Kepala Jorong	Jumlah Kartu Keluarga	Luas Wilayah (Km^2)
1	Koto Gadang	Agustar	320	1.256
2	Sopan Tanah	Masriyon	235	946
3	Bunga Tanjung	Cengdi Putra	255	882
4	Aur Duri	Rattius	163	672
5	Ampang Gadang 1	Yasri Efendi	165	898
6	Ampang Gadang 2	Wandi Sasriadi	232	968
7	Ronah	Ardi Hartono	420	1.013
8	Koto Tinggi 1	Onkasri	286	1.249
9	Koto Tinggi 2	Zamri	310	1.244
10	Koto Tinggi 3	Ben Hardi	316	1.267
11	Sopan Godang	Aidil Usman	132	992
12	Nenan	Dedi Rahmad	187	943
Jumlah			3021	12.330

Sumber: RPJM tahun 2016 Nagari Maek

2. Aspek Geografis

Nagari Maek termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukik Barisan. Maek, wilayahnya terletak pada 6 – 11 Lintang Utara serta berada pada ketinggian 400 s/d 500 meter dari permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 30 C. Jarak dari ibu kota Kecamatan 18 Km, dari Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat 170 Km. Luas Nagari Maek 12.330 Km^2, dengan batas-batas sebagai berikut:[70]

Sebelah Utara : Berbatas dengan Nagari Koto Lamo / Kecamatan

[70] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

Kapur IX

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Nagari Banja Loweh

Sebelah Barat : Berbatas dengan Rao Mapat Tunggal Kabupaten Pasaman

Sebelah Timur : Berbatas dengan Nagari Talang Maur / Kecamatan Mungka

Bentuk permukaan Nagari Maek merupakan daerah perbukitan dan dataran yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah Nagari Maek dibagi atas kemiringan 8-15%, kemiringan 15-30%, kemiringan 30-45% dan kemiringan > 45%. Dengan ketinggian 617 diatas permukaan laut.

Mengenai kondisi topografi pada Nagari Maek dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Kondisi Topografi Nagari Maek

No	Kemiringan	Kondisi	Luas (Ha)	%
1	8-15%	Landai	2.117,1	32
2	15-30%	Agak Curam	859,95	13
3	30-45%	Curam	2579,45	39
4	> 45%	Sangat Curam	1058,20	16
Jumlah			6615	100

Sumber: RPJM tahun 2016 Nagari Maek

Daerah ini mempunyai tipe A (*Achmidt Ferguson*), dengan curah hujan 3870 mm/tahun. Jumlah bulan basah 10 bulan / tahun dengan 2 bulan kering per tahun. Daerah ini mempunyai awal musim hujan pada bulan Agustus. Keadaan iklim pada Nagari Maek beriklim tropis, dimana

suhu udara pada kawasan ini berkisar antara 32 C dengan curah hujan 14,93 mm/hari.[71]

Ditinjau dari segi hidrologinya secara umum sistem air pada Nagari Maek ini dapat dibedakan atas dua, yaitu:

a. Air Permukaan

Air permukaan ini berupa aliran sungai yang mengalir dalam Nagari Maek yakni Sungai Batang Maek dan Sungai Batang Sinamar. Sungai ini dijadikan sebagai aliran akhir dari pembuangan air limbah masyarakat dari saluran drainase sekunder yang ada dalam lingkungan penduduk baik perumahan maupun permukiman. Di samping itu juga dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sebagian kecil masyarakat Nagari Maek dan juga untuk keperluan pertanian.

b. Air Tanah

Mengenai air tanah ini, biasanya berkaitan dengan proses penggunaannya apakah itu berupa pemanfaatan air tanah melalui proses galian maupun melalui proses pengeboran.

3. Aspek Demografi

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk

No	Keterangan	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Penduduk	9.274	Jiwa
2	Jumlah Laki-Laki	4.511	Jiwa
3	Jumlah Perempuan	4.763	Jiwa
4	Jumlah KK	3021	KK

[71] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

5	Jumlah KK RTM	993	KK

Sumber: RPJM tahun 2016 Nagari Maek

Nagari Maek dihuni oleh 9.274 jiwa, yang terdiri dari 4.511 laki-laki dan 4.763 perempuan. Semuanya terhimpun dalam 2.702 Kepala Keluarga. Pekerjaan yang digeluti oleh Penduduk Maek adalah 25,7% Petani/Peternak, 1% Pedagang, 0,9% PNS, 0,5% Pegawai Swasta, 0,01% TNI/Polri, 0,3% Tukang, 0,2% Bidan, 0,5% Pensiunan, 9,6% Pengrajin dan sisanya adalah Pelajar/Mahasiswa serta Pengangguran.[72]

4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertanian

Pada sektor pertanian terdapat beberapa jenis produksi diantaranya padi, palawija dan jenis sayuran. Untuk jenis produksi padi yang terdapat pada Nagari Maek yang dihasilkan hanya padi sawah.

b. Perkebunan

Pada sektor perkebunan pada Nagari Maek yang ada hanya perkebunan rakyat. Sedangkan untuk perkebunan swasta terdapat perkebunan teh yang sudah tidak beroperasi lagi. Jenis produksi perkebunan tersebut komoditas yang dihasilkan kelapa, gambir, kakao, karet, pinang dan sawit sebahagian.

c. Usaha Masyarakat

[72] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

Adanya usaha masyarakat dalam pembuatan tikar pandan yang dulu dikenal dengan nama Lapiak Pandan Maek. Pembuatan tikar pandan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Maek khususnya Jorong Koto Tinggi. Usaha ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga mempunyai nilai seni dan menjadikan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama kaum ibu-ibu. Tikar ini biasanya dijual dalam Nagari Maek dan ke daerah terdekat.

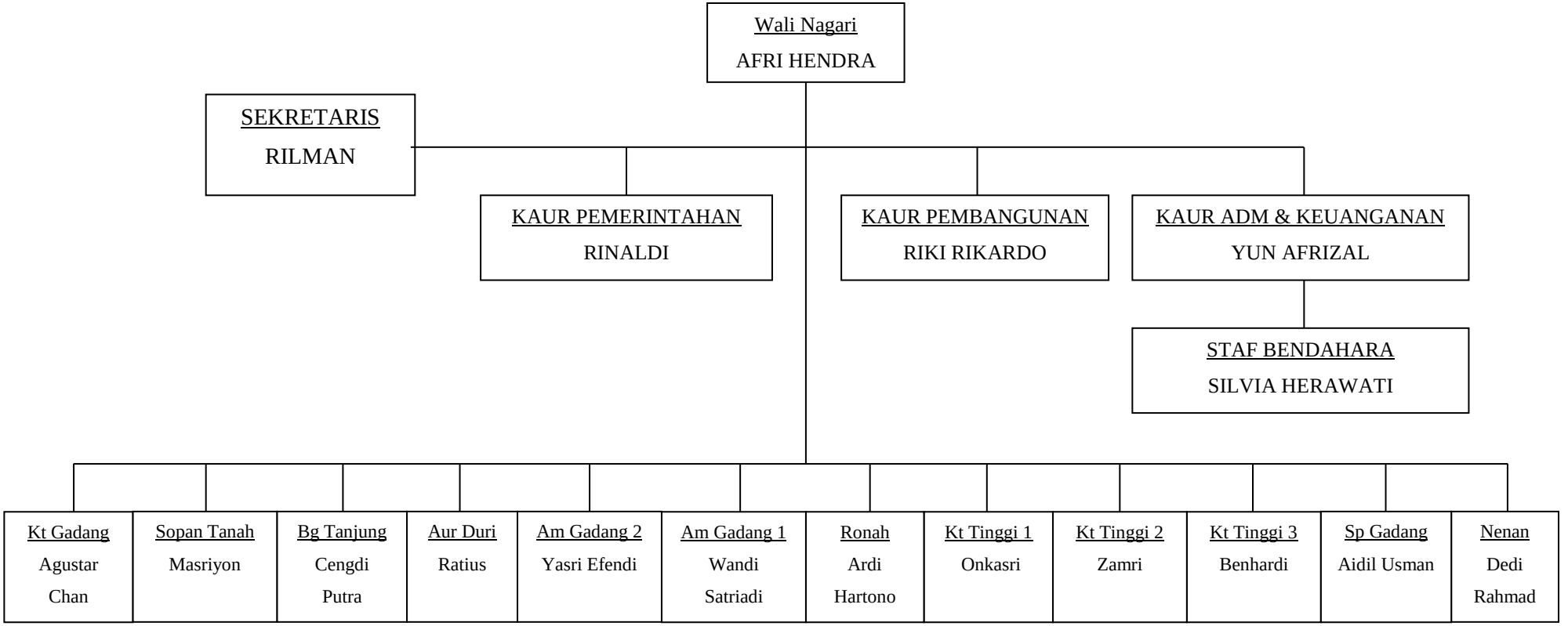
d. Kehutanan

Nagari Maek yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan yang didalamnya terkandung berbagai macam hasil hutan seperti kayu, rotan, manau serta gaharu yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Luas hutan di Nagari Maek sekitar 1.029.000 Ha, yang terdiri dari 15.638 Ha hutan produksi serta 70.115 Ha adalah hutan lindung.

5. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

a. Struktur Pemerintahan Nagari Maek

Tabel 4.4
Struktur Pemerintahan Nagari Maek



Sumber: RPJM tahun 2016 Nagari Maek

Adapun lembaga sosial yang terdapat di Nagari Maek antara lain sebagai berikut:[73]

1. BAMUS (Badan Musyawarah)

   Merupakan lembaga tertinggi di Nagari yang bertugas mengesahkan program-program yang dibuat oleh Nagari.

2. LSN (Lembaga Syarak Nagari)

   Lembaga ini merupakan lembaga yang dimiliki oleh Nagari yang bertanggung jawab dalam urusan yang berhubungan dengan keagamaan, seperti pembinaan mubaligh untuk masyarakat. Keanggotaannya berasal dari masyarakat Nagari Maek. Dahulunya lembaga ini bernama BMAS, yang kemudian berdasarkan Perda No. 10 tahun 2007 BMAS dihapuskan dan digantikan dengan LSN.

3. KAN (Kerapatan Adat Nagari)

   Lembaga ini bertanggung jawab untuk urusan yang berhubungan dengan adat.

Disamping lembaga tersebut ada organisasi kepemudaan di Nagari Maek, yang merupakan gabungan dari pemuda-pemudi yang ada di Jorong Nagari Maek, yaitu Ikatan Pemuda Pelajar Maek (IPPM), yang juga bersinergi dengan para pelajar dan mahasiswa yang ada di luar Nagari Maek.

[73] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

e. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di Nagari Maek dapat dilihat pada tabel berikut ini:[74]

Tabel 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	12
2	SD	11
3	SLTP	2
4	SLB	1
5	SLTA	1
Jumlah		27

Sumber: RPJM tahun 2016 Nagari Maek

Untuk sarana pendidikan pada tingkat nagari, sarana pendidikan yang ada telah tersedia pada setiap jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada tabel, sarana pendidikan paling banyak yaitu pada tingkat SD sebanyak 11 sekolah, sedangkan yang paling sedikit yaitu SLB dan SLTA.

Untuk sarana pendidikan pada jenjang SD, ada 11 sekolah di Nagari Maek yang dinilai belum mencukupi kebutuhan dalam Nagari. Karena masih adanya 2 Jorong yang belum mempunyai Gedung Sekolah Dasar (SD) yaitu Jorong Aur Duri dan Jorong Sopan Gadang.

Untuk sarana pendidikan pada jenjang SLTP, ada 2 sekolah yang berbeda, yaitu pendidikan pada sekolah biasa / umum dan

[74] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

sekolah keagamaan. Status kedua sekolah ini pun sama, SMP dan MTS adalah sekolah Negeri.

Sedangkan sekolah untuk anak cacat telah ada yakni sebuah SLB yang terletak di tengah-tengah pusat Nagari Maek.

f. Sarana Peribadatan

Untuk sarana peribadatan pada kawasan rencana peribadatan berupa 14 unit masjid, 15 unit mushalla. Masjid dan mushalla yang ada di Nagari ini sudah terdapat di setiap Jorong sehingga persebarannya cukup baik dan dapat melayani masyarakat dengan baik.

g. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting dalam menunjang kegiatan aktivitas yang ada. Untuk sarana kesehatan pada kawasan Nagari Maek ini terdapat sarana kesehatan berupa Puskesmas, Polindes dan Posyandu.

Tabel 4.6
Sarana Kesehatan di Nagari Maek

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi
1	Puskesmas	1	Aur Duri
2	Puskesmas Pembantu	1	Nenan
3	Pos Kesri	2	Sopan Godang / Sopan Tanah
4	Polindes	2	Ampang Gadang / Koto Tinggi
5	Posyandu	20	Masing-masing Jorong
Jumlah		26	

Sumber: RPJM tahun 2016 Nagari Maek

Puskesmas pada Nagari Maek ini hanya ada satu yang terletak di Jorong Aur Duri. Sebagai Puskemas yang melayani untuk Kenagarian Maek, adanya kegiatan pelayanan kesehatan yang relatif

tinggi setiap waktunya. Puskesmas ini dibantu oleh dua buah Polindes dan beberapa Posyandu yang tersebar di setiap Jorong.

Tabel 4.7
Jumlah Tenaga Medis

No	Tenaga Medis	Jumlah
1	Dokter Umum	1
2	Dokter Gigi	-
3	Dukun Bersalin Terlatih	2
4	Bidan	18
5	Perawat	8
6	Dukun Pengobatan Alternatif	7
Jumlah		**36**

Sumber: RPJM tahun 2016 Nagari Maek

h. Sarana Perekonomian

Kegiatan perekonomian di Nagari Maek ini berupa pasar. Pasar 2 kali seminggu yang dilakukan pada setiap hari Senin dan Kamis tapi yang paling ramai adalah pada hari Kamis pasar ini menjual segala jenis kebutuhan sehari-hari dan hasil bumi lainnya. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang para penjual dan pembelinya berasal dari Nagari Maek sendiri dari tetangga.[75]

i. Sarana Pemerintahan

Di Nagari Maek sarana pemerintahan yang ada berupa kantor wali Nagari yang dilengkapi dengan sarana yang kurang memadai. Kantor wali Nagari ini dinilai berada pada lokasi yang strategis karena berada pada pertengahan Nagari, sehingga dapat dijangkau dari masing-masing jorongnya. Lokasi kantor ini pun berada di

[75] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

pinggir jalan utama yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan sehingga memudahkan dalam aksesnya.

j. Sarana Irigasi

Irigasi yang terdapat di Nagari Maek terdiri dari irigasi teknis dan irigasi non teknis. Dimana sumber air berasal dari mata air yang berasal dari gunung serta sungai.

k. Sarana Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai kebutuhan penunjang segala aktivitas manusia. Sumber air bersih di kawasan Nagari Maek sebagian besar dari sumur gali dan mata air.

l. Sarana Transportasi

Transportasi merupakan suatu faktor yang mendukung bagi perkembangan suatu nagari. Transportasi berhubungan erat dengan jalan, moda, jarak tempuh menuju pusat kota dan yang paling menentukan yaitu tingkat aksesibilitas, dengan tingginya tingkat aksesibilitas pada suatu wilayah akan mempercepat perkembangan wilayah tersebut.[76]

Moda yang terdapat di Nagari Maek terdiri Bus/Mini Bus, Angkotan Desa dan Ojek. Moda yang terdapat di Nagari ini sudah mencukupi karena masyarakat di kawasan ini selain menggunakan angkutan umum juga memiliki kendaraan pribadi.

[76] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

m. Jaringan Jalan

Pola jaringan jalan merupakan bagian dari struktur tata ruang yang berpengaruh kepada pembentukan lingkungan kawasan perencanaan dengan fungsi utama sebagai sarana penghubung antar lokasi. Pola jaringan jalan yang ada di Nagari Maek ini pada umumnya masih kurang baik hal ini dapat dilihat dari kondisi eksistingnya.

Sebagian besar material jalan yang ada di Nagari Maek masih berupa jalan tanah namun terdapat juga jalan kerikil dan jalan aspal. Dan berdasarkan kewenangan jalan di Nagari Maek terdiri dari jalan kabupaten dan jalan lingkungan.[77]

n. Jarak Tempuh

Adapun waktu tempuh dari Nagari Maek menuju ke Ibukota Kecamatan, menuju ke Ibukota Kabupaten dan menuju ke Provinsi dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Jarak Tempuh Nagari Maek menuju ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

No	Tujuan	Jarak (Km)
1	Ke Ibukota Kecamatan	18
2	Ke Kabupaten	45
3	Ke Provinsi	170

Sumber: RPJM tahun 2016 Nagari Maek

[77] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

5. Aspek Daya Saing Nagari

a. Pertanian

Pada sektor pertanian terdapat beberapa jenis produksi diantaranya padi, palawija dan jenis sayuran. Untuk jenis produksi padi yang terdapat pada Nagari Maek yang dihasilkan hanya padi sawah.

b. Perkebunan

Pada sektor perkebunan pada Nagari Maek yang ada hanya perkebunan rakyat dengan luas lahan yang sangat cukup sekitar 3.307 ha lahan perkebunan, sedangkan untuk perkebunan swasta tidak ada. Jenis produksi perkebunan tersebut komoditas yang dihasilkan adalah gambir, kakao, karet, pinang, kelapa, dan sawit.

c. Perekonomian

Kegiatan perekonomian di Nagari Maek ini berupa pasar. Pasar 2 kali seminggu yang dilakukan pada setiap hari Senin dan Kamis, tetapi yang paling ramai adalah pada hari Kamis. Pasar ini menjual segala jenis kebutuhan sehari-hari dan hasil bumi lainnya. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang mana para penjual dan pembelinya berasal dari Nagari Maek sendiri.[78]

d. Pariwisata

Nagari Maek mempunyai panorama alam yang sangat indah. Nagari Maek yang dikelilingi oleh perbukitan yang permukiman

[78] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

penduduk berada di tengah sehingga sering disebut oleh turis-turis dengan nama nagari kuali. Nagari Maek mempunyai banyak panorama alam seperti Bukik Posuak, Sarosah Barasok, Air Terjun 7 Tingkat, dan Panorama Angin Berhembus, sedangkan untuk wisata sejarah ada Menhir, jejak tapak manusia besar.

e. Keuangan dan Kelompok

Adapun lembaga keuangan yang terdapat di Nagari Maek yaitu LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Mandiri). Lembaga keuangan mikro mandiri merupakan salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) oleh pemerintah yaitu PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) yang bertujuan mengatasi permasalahan petani dalam hal permodalan, akses pasar, dan teknologi. Program ini dilaksanakan oleh petani (pemilik atau penggarap), peternak, perkebunan, dan holtikultura yang tergabung dalam kelompok tani dan selanjutnya kelompok tani bergabung membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No.16/Permentan/OT.140/2/2008.[79]

Sistem peminjaman hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang tergabung sebagai anggota Gapoktan. Untuk tahap awal, dana yang diberikan sebesar 2 juta rupiah, dengan bunga sebesar 0,5% perbulan atau 6% pertahun sedangkan untuk tahap berikutnya dana yang diberikan sesuai dengan kemampuan si petani untuk melakukan

[79] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

pembayaran serta untuk sistem pembayarannya dilakukan setiap bulan.

f. Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat

Adanya usaha masyarakat dalam pembuatan tikar pandan yang dulu dikenal dengan nama Lapiak Pandan Maek. Pembuatan tikar pandan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Maek khususnya Jorong Koto Tinggi. usaha ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga mempunyai nilai seni dan menjadikan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama kaum ibu-ibu. Tikar ini biasanya di jual dalam Nagari Maek dan ke kecamatan-kecamatan terdekat. Ada pun juga banyak usaha-usaha rumahan guna penunjang perekonomian keluarga seperti produk-produk berbagai olahan makanan.

g. Kehutanan

Nagari Maek yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan yang didalamnya terkandung berbagai macam hasil hutan seperti kayu, rotan, manau serta gaharu yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Luas hutan di Nagari Maek sekitar 1.029.000 ha, yang terdiri dari 15.638 ha hutan produksi serta 70.115 adalah hutan lindung.[80]

[80] Kantor Wali Nagari Maek, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, tahun 2016

B. Hasil Analisis Data

1. Deskripsi Jawaban Responden

Setiap responden mempunyai karakteristik yang berbeda-beda untuk itu perlu dilakukan pengelompokan dengan karakteristik tertentu. Adapun karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden peserta PKH dengan karakteristik jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan. Berikut ini hasil pengelompokan responden berdasarkan kuesioner yang telah disebar.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin peserta PKH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	86	100%
2	Laki-laki	0	0%
Total		**86**	**100**

Sumber: data primer diolah 2019

Dari tabel 4.9 diatas dapat dikemukakan bahwa 100% responden atau seluruh responden adalah perempuan, karena yang menjadi pengurus rumah tangga peserta PKH adalah perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia dari responden peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 25 Tahun	-	-
2	26 – 45 Tahun	60	69,77%
3	> 46 Tahun	26	30,23%
Total		**86**	**100**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dikemukakan bahwa responden PKH tidak ada yang berusia di bawah 25 Tahun, mayoritas responden berusia kisaran 26-45 tahun dengan jumlah 60 orang responden atau 69,77% responden. Dan 26 responden atau 30,23% responden berusia lebih 46 Tahun.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan dari responden peserta PKH adalah:

Tabel 4.11
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terkahir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SD / Sederajat	55	63,95%
2	SMP / Sederajat	28	32,56 %
3	SMA / Sederajat	2	2,33 %
6	Sarjana	1	1,16%
Total		**86**	**100 %**

Sumber: data primer diolah 2019

Dari tabel 4.11 di atas dapat diketahui jumlah responden yang memiliki pendidikan dengan tingkat pendidikan terakahir SD berjumlah 55 orang atau sebesar 63,95%, SMP/Sederajat berjumlah 28 orang atau sebesar 32,56%, SMA/ Sederajat berjumlah 2 orang atau sebesar 2,33% , Sarjana berjumlah 1 atau sebesar 1,16%. Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden

yang paling banyak adalah terdapat pada tingkat SD/Sederajat yaitu sebanyak 55 orang nasabah atau sebesar 63,95 %.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis pekerjaan dari responden peserta PKH di Nagari Maek adalah:

Tabel 4.12
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	57	66,28 %
2	Petani	27	31,4 %
3	Pedagang	1	1,16 %
4	Guru Honorer	1	1,16%
Total		**86**	**100 %**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dikemukakan bahwa 66,28% atau sebanyak 57 orang responden bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga; 27 orang responden atau 31,4% responden bekerja sebagai petani, 1 orang responden bekerja sebagai pedagang dan 1 orang responden bekerja sebagai gruru honorer. Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa Ibu Rumah Tangga adalah responden yang paling banyak dengan jumlah 57 KPM atau sebesar 66,28%.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Tingkat penghasilan dari responden peserta PKH adalah:

Tabel 4.13
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

No	Penghasilan	Jumlah	Persentase
1	< Rp.750.000	68	79,07 %
2	Rp.750.000 – Rp. 1.500.000	13	15,12 %
3	Rp.1.500.000 – Rp. 3.000.000	5	5,81 %
4	>Rp.3.000.000	-	0%
Total		**86**	**100 %**

Sumber: data primer diolah 2019

Dari tebel 4.13 di atas dapat diketahui jumlah responden yang memilki pendapatan perbulan sebesar < Rp. 750.000 berjumlah 68 orang atau sebesar 79,07%, pendapatan Rp.750.000 – Rp.1.500.000 berjumlah 13 orang atau sebesar 15,12%, pendapatan Rp.1.500.000 – Rp.3.000.000 berjumlah 5 orang atau sebesar 5,81%, dan tidak ada responden yang berpendapatan > Rp.3.000.000. Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa responden paling banyak berpendapatan kurang dari Rp 750.000 per bulan.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pengentasan Kemiskinan.

a. Variabel Program Keluarga Harapan (variabel X)

Distribusi jawaban responden pada Variabel Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.14
Tanggapan Responden tentang Pemenuhan Kebutuhan Sekolah Anak

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	48	55,8%
2	Setuju	38	44,2%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori sangat setuju yaitu sebanyak 48

orang responden atau 55,8% responden menyatakan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka, dan sisanya 38 orang responden atau 44,2% menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa semua responden menyatakan setuju, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden tentang Terpenuhinya Pendidikan Dasar Anak

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	47	54,7%
2	Setuju	39	45,3%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori sangat setuju yaitu sebanyak 47 responden atau 54,7% responden menyatakan bahwa pendidikan dasar anak mereka terpenuhi, dan sisanya 39 responden atau 45,3% menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa semua responden menyatakan setuju.

Tabel 4.16
Tanggapan Responden tentang Dengan Adanya Bantuan PKH, Anak Semakin Rajin Bersekolah

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	38	44,2%
2	Setuju	45	52,3%
3	Kurang Setuju	2	2,3%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1,2%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 45 responden atau 52,3% responden menyatakan bahwa dengan adanya bantuan PKH anak mereka semakin rajin bersekolah, sisanya 38 responden atau 44,2% menyatakan sangat setuju, 2 responden menyatakan kurang setuju dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpilkan bahwa 83 orang responden menyatakan setuju dan 3 orang menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden tentang Bantuan PKH Dapat Memenuhi Kebutuhan Gizi

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	17	19,8%
2	Setuju	57	66,3%
3	Kurang Setuju	11	12,8%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1,2%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 57 responden atau 66,3% responden menyatakan bahwa bantuan PKH dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan gizi anak mereka, sisanya 17 responden atau 19,8% menyatakan sangat setuju, 11 responden menyatakan kurang setuju dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 74 orang responden menyatakan setuju dan 12 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.18
Tanggapan Responden tentang Tidak Memiliki Kendala untuk Berobat ke Rumah Sakit

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	17	19,8%
2	Setuju	66	76,7%
3	Kurang Setuju	2	2,3%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1,2%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 66 responden atau 76,7% responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kendala untuk berobat ke puskesmas / rumah sakit, sisanya 17 responden atau 19,8% menyatakan sangat setuju, 2 responden menyatakan kurang setuju dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 83 orang responden menyatakan setuju dan 3 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden tentang KPM Semakin Rajin Memeriksakan Diri dan Anak ke Pos Pelayanan Kesehatan

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	7	19,8%
2	Setuju	60	76,7%
3	Kurang Setuju	18	2,3%
4	Tidak Setuju	1	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	1,2%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 60 responden atau 69,8% responden menyatakan bahwa mereka semakin rajin

memeriksakan diri dan anak mereka ke pos pelayanan kesehatan, sisanya 18 responden atau 19,8% menyatakan kurang setuju, 7 responden menyatakan sangat setuju dan 1 responden menyatakan tidak setuju. Variabel Pengentasan Kemiskinan (variabel Y)

Tabel 4.20
Tanggapan Responden tentang KPM Memiliki Pakaian Berbeda

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	31	36,0%
2	Setuju	52	60,5%
3	Kurang Setuju	3	3,5%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 52 responden atau 60,5% responden menyatakan bahwa masing-masing anggota keluarga mereka memiliki pakaian berbeda di rumah, bekerja dan sekolah. Dan sisanya 31 responden atau 36,0% menyatakan sangat setuju, 3 responden menyatakan kurang setuju.

Tabel 4.21
Tanggapan Responden tentang Frekuensi Pembelian Pakaian Meningkat

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	3	3,5%
2	Setuju	26	30,2%
3	Kurang Setuju	50	58,1%
4	Tidak Setuju	6	7,0%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1,2%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 responden atau 3,5% yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan frekuensi pembelian pakaian meningkat, dan 26 responden atau 30,2% menyatakan setuju. Hasil terbanyak terdapat pada kategori kurang setuju yaitu sebanyak 50 responden atau 58,1% responden. Sisanya 6 responden atau 7,0% menyatakan tidak setuju, dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 29 orang responden menyatakan setuju dan 57 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden tentang Jenis Pakaian KPM Bervariasi

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	5	5,8%
2	Setuju	68	79,1%
3	Kurang Setuju	12	14,0%
4	Tidak Setuju	1	1,2%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 68 responden atau 79,1% responden menyatakan bahwa jenis pakaian yang mereka pakai bervariasi. 5 responden menyatakan sangat setuju, 12 responden menyatakan kurang setuju dan 1 responden menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 73 orang responden menyatakan setuju dan 13 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.23
Tanggapan Responden tentang Kondisi Makanan Sehari-hari KPM Sudah Cukup

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	17	19,8%
2	Setuju	67	77,9%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	2	2,3%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.23 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 67 responden atau 77,9% responden menyatakan bahwa makanan sehari-hari mereka sudah cukup. 17 responden menyatakan sangat setuju, dan 2 responden menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 84 orang responden menyatakan setuju dan 2 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.24
Tanggapan Responden tentang Gizi KPM Cukup Terpenuhi

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	4	4,7%
2	Setuju	52	60,5%
3	Kurang Setuju	29	33,7%
4	Tidak Setuju	1	1,2%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.24 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 52 responden atau 60,5% responden menyatakan bahwa gizi mereka cukup terpenuhi. 4 responden menyatakan sangat setuju, 29

responden menyatakan kurang setuju dan 1 responden menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 56 orang responden menyatakan setuju dan 30 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.25
Tanggapan Responden tentang Menu Makanan KPM Setiap Hari Bervariasi

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	5	5,8%
2	Setuju	65	75,6%
3	Kurang Setuju	14	16,3%
4	Tidak Setuju	2	2,3%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.25 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 65 responden atau 75,6% responden menyatakan bahwa menu makanan mereka setiap hari bervariasi. 5 responden menyatakan sangat setuju, 14 responden menyatakan kurang setuju dan 2 responden menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 70 orang responden menyatakan setuju dan 16 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.26
Tanggapan Responden tentang KPM Memiliki Tempat Tinggal yang Layak

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	17	19,8%
2	Setuju	65	75,6%
3	Kurang Setuju	1	1,2%
4	Tidak Setuju	1	1,2%
5	Sangat Tidak Setuju	2	2,3%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.26 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 65 responden atau 75,6% responden menyatakan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang layak. 17 responden menyatakan sangat setuju, 1 responden menyatakan kurang setuju, 1 responden menyatakan tidak setuju dan 2 responden menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 82 orang responden menyatakan setuju dan 4 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.27
Tanggapan Responden tentang Peralatan dan Perlengkapan Rumah KPM Sudah Memadai

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	3	3,5%
2	Setuju	43	50,0%
3	Kurang Setuju	35	40,7%
4	Tidak Setuju	3	3,5%
5	Sangat Tidak Setuju	2	2,3%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.27 di atas dapat diketahui bahwa hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 43 responden atau 50,0% responden menyatakan bahwa peralatan dan perlengkapan rumah mereka sudah memadai. 3 responden menyatakan sangat setuju, 35 responden menyatakan kurang setuju, 3 responden menyatakan tidak setuju dan 2 responden menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 46 orang responden menyatakan setuju dan 40 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.28
Tanggapan Responden tentang Fasilitas Buang Air Besar Sudah Ada Dalam Rumah

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	3	3,5%
2	Setuju	13	15,1%
3	Kurang Setuju	20	23,3%
4	Tidak Setuju	22	25,6%
5	Sangat Tidak Setuju	28	32,6%
Jumlah		**86**	**100%**

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.28 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 responden yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan fasilitas buang air besar sudah ada dalam rumah, 13 responden menyatakan setuju dan 20 responden menyatakan kurang setuju. Hasil terbanyak terdapat pada kategori sangat tidak setuju yaitu sebanyak 28 responden atau 32,6% dan 22 responden atau 25,6% menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 16 orang responden menyatakan setuju dan 70 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

3. Alat Uji Kuesioner

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan r hitung dengan r tabel dimana df = N-2 dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan N=86 sehingga dalam penelitian ini diperoleh r tabel = 0,2120.

Apabila r hitung > dari r tabel maka dikatakan valid. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji validitas dengan menggunakan program SPSS 16, adapun hasil outputnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.29
Uji Validitas Variabel Program Keluarga Harapan (X)

Variabel	Item Pernyataan	*Corrected item total correlation* (r Hitung)	r Tabel	Keterangan
Program Keluarga Harapan (PKH)	X.1	0,707	0,2120	Valid
	X.2	0,728	0,2120	Valid
	X.3	0,881	0,2120	Valid
	X.4	0,827	0,2120	Valid
	X.5	0,688	0,2120	Valid
	X.6	0,520	0,2120	Valid

Sumber: olahan data SPSS 16 (2019)

Berdasakan tabel 4.29 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel X dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung > r tabel ,dengan r Tabel yang diperoleh sebesar 0,2120.

Tabel 4.30
Uji Validitas Variabel Pengentasan Kemiskinan (Y)

Variabel	Item Pernyataan	*Corrected item total correlation* (r Hitung)	r Tabel	Keterangan
Pengentasan Kemiskinan (Y)	Y.1	0,555	0,2120	Valid
	Y.2	0,624	0,2120	Valid
	Y.3	0,503	0,2120	Valid
	Y.4	0,703	0,2120	Valid
	Y.5	0,441	0,2120	Valid
	Y.6	0,727	0,2120	Valid
	Y.7	0,691	0,2120	Valid
	Y.8	0,728	0,2120	Valid
	Y.9	0,670	0,2120	Valid

Sumber: olahan data SPSS 16 (2019)

Berdasakan tabel 4.30 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r $_{hitung}$ > r $_{tabel}$,dengan r $_{Tabel}$ yang diperoleh sebesar 0,2120.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu hal yang dapat dipecaya untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan, sehingga angket tersebut dapat dihandalkan untuk mengukur variabel penelitian. Dalam penelitian ini reliabel dan tidak reliabel suatu variabel menggunakan *cronbach alpha*. Dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach alpha* lebih dari r tabel, apabila nilai *Cronbach alpha* lebih kecil dari r tabel berarti angket atau kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Dalam penelitian ini maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.31
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	*Reability coefficient*	*Cronbach alpha*	R tabel	Keterangan
X	6	0,822	0,2120	Realibel
Y	9	0,788	0,2120	Realibel

Dari tabel 4.31 di atas diketahui nilai *Cronbach alpha* variabel X adalah sebesar 0,822 yang mana angka tersebut lebih besar dari r tabel sebesar 0,2120. Untuk variabel Y nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,788 > 0,2120. Maka dapat disimpulkan bahwa angket atau

kuesioner penelitian dinyatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

4. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.[81] Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *uji one sample kolmogrov smirnov,* dimana jika besar dari 0,05 maka data tersebut telah terdistribusi normal.

Tabel 4.32
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters[a]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,17695757
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,051
	Negative	-,096
Kolmogorov-Smirnov Z		,887
Asymp. Sig. (2-tailed)		,411
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: olahan data SPSS 16 (2019)

Dari tabel 4.32 di atas maka dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* didapatkan hasil nilai signifikasi dari uji normalitas sebesar 0,411

[81] Agus Tri Basuki dan Nano Prawato, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 57

dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikasi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi di antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.[82] Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* (uji DW). Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.33
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,545[a]	,297	,289	3,196	1,942
a. Predictors: (Constant), PKH					
b. Dependent Variable: Pengentasan Kemiskinan					

Sumber: olahan data SPSS 16 (2019)

Dari tabel 4.33 di atas maka dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* pada *model* summary sebesar 1,942. Dengan nilai tabel signifikansi 5% (0,05) dengan jumlah sampel yang digunakan 86 dengan jumlah variabel 2. Dan dari tabel *Durbin-watson* didapatkan dU 1,6971 dan dL sebesar 1,6021 Sehingga diperoleh kesimpulan dU < d < 4-dU (4-1,6971) atau 1,6971 < 1,942 < 2,3029, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

[82] Agus Tri Basuki dan Nano Prawato, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 60

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Hasil uji heteroksiditas dalam penelitian ini di peroleh sebagai berikut:

Tabel 4.34
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,052	2,348		-,448	,655
	PKH	,133	,092	,156	1,450	,151

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: olahan data SPSS 16 (2019)

Dari tabel 4.34 di atas maka dapat dilihat uji heteroskedastisitas dengan perolehan nilai signifikan untuk X sebesar 0,151 yang berarti besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Bila skor variabel bebas diketahui maka skor variabel

terikatnya dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel bebasnya. Model dari regresi sederhana yang ditujukan untuk melakukan prediksi nilai variabel dependen (Y) dengan menggunakan satu variabel independen (X).

Tabel 4.35
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	12,130	3,534		3,433	,001			
PKH	,821	,138	,545	5,958	,000	,545	,545	,545

a. Dependent Variable: Pengentasan Kemiskinan

Sumber: olahan data SPSS 24 (2019)

Berdasarkan tabel 4.35 hasil analisis regresi linear sederhana diatas, dapat diketahui persamaan regresi sederhana adalah

Y= 12,130+0,821 X.

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar 12,130 menyatakan jika variabel PKH (X) sama dengan nol (konstan) maka pengentasan kemiskinan sama dengan 12,130 satuan.
b. Koefisien regresi b untuk X bertanda positif sebesar 0,821. Hal ini berarti apabila nilai koefisien variabel independen konstan maka penambahan variabel PKH sebesar satu satuan akan meningkatkan pengentasan kemiskinan sebesar 0,821 satuan. Karena nilai koefisien

regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKH mempunyai pengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan.

6. Uji Koefesien Determinasi

Koefisien determinan (R^2) menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan variabel dependen.[83]

Tabel 4.36
Hasil Uji Koefesien Determinasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,545[a]	,297	,289	3,196	1,942
a. Predictors: (Constant), PKH					
b. Dependent Variable: Pengentasan Kemiskinan					

Sumber: olahan data SPSS 16 (2019)

Dari tabel 4.36 di atas maka dapat dijelaskan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,297 atau sebesar 29,7%. Artinya pengaruh variabel PKH terhadap variabel Pengentasan Kemiskinan adalah sebesar 29,7%. Sedangkan sisanya 70,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

7. Uji t

Uji T merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Uji t

[83] Achmad Sari Supriyanto dan Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 47

digunakan dalam pengujian statistik untuk melihat apakah variabel *independent* secara individu berpengaruh terhadap variabel *dependent.* Untuk menacari T tabel maka rumus yang digunakan df = n-k-1. n (jumlah sampel), k (variabel X + variabel Y) dengan nilai sig a (0,05) : 2 = 0,025 Dalam penelitian ini maka diperoleh hasil data dengan menggunakan uji T sebagai berikut:

T tabel = (a/2 ; n-k-1)

= (0,025 ; 83) = 1,989

Tabel 4.37
Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	12,130	3,534		3,433	,001			
	PKH	,821	,138	,545	5,958	,000	,545	,545	,545

a. Dependent Variable: Pengentasan Kemiskinan

Sumber: olahan data SPSS 16 (2019)

Berdasarkan tabel 4.37 output SPSS "*Coefficients*" di atas diketahui nilai Signifikansi untuk variabel Program Keluarga Harapan (X) terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel atau 5,958 > 1,989. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya PKH (X) berpengaruh nyata terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y).

C. Pembahasan

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum atau di bawah garis kemiskinan. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan, segala upaya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin adalah program keluarga harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PKH berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan seberapa besar pengaruhnya. Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 16, maka diperoleh hasil bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kenagarian Maek. Dilihat dari uji determinasi yang dilakukan memiliki pengaruh sebesar 29,7% dan masih ada kontribusi lain yang dapat mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan.

Hasil dari uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel X bertanda positif sebesar 0,821, artinya terdapat pengaruh positif antara PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Nagari Maek.

Hasil dari uji T menunjukkan bahwa signifikansi untuk variabel Program Keluarga Harapan (X) terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel atau 5,958 > 1,989. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya PKH (X) secara parsial berpengaruh nyata terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y).

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (komponen pendidikan dan kesehatan) telah membantu untuk mengurangi kemiskinan masyarakat sebesar 29,7%. Dengan adanya bantuan PKH pendidikan anak dan kesehatan keluarga lebih terjamin.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ditinjau dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kenagarian Maek, yaitu:

1. Prinsip Keseimbangan

   Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara.

Prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan PKH dapat dilihat dari pembagian bantuan kepada setiap rumah tangga, dimana setiap peserta PKH tidak menerima bantuan yang sama besar akan tetapi mereka memperoleh bantuan sesuai dengan komposisi keluarga masing-masing. Proporsi bantuan masing-masing keluarga ditentukan sesuai seberapa banyak anggota keluarga mereka yang termasuk dalam kategori penerima bantuan. Artinya semakin banyak anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan, maka bantuan yang akan diterima juga semakin banyak.

Selain hal tersebut bantuan PKH juga menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban peserta PKH. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya syarat-syarat atau kewajiban yang diberikan pada setiap peserta sebelum memperoleh bantuan. Artinya, sebelum para peserta memperoleh haknya yakni menerima bantuan, maka mereka harus memenuhi kewajiban mereka sebagai peserta yaitu rajin menghadiri pertemuan kelompok, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan kesehatan.

2. Prinsip Keadilan

Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :





Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*."

Dalam hal pendistribusian bantuan PKH, pemerintah menetapkan pemberian bantuan kepada seluruh RTSM yang terdaftar di Badan Pusat Statistik. Pemerintah menyalurkan bantuan PKH sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS dan jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap keluarga tidak sama banyaknya tetapi disesuaikan dengan komposisi anggota keluarga yang termasuk kategori penerima bantuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal tersebut, pemerintah telah menerapkan prinsip keadilan.

Namun dalam hal penetapan peserta PKH di Kenagarian Maek adanya unsur ketidakmerataan atau belum tepatnya sasaran penerima bantuan, terlihat dari adanya Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dikategorikan sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut bukan kesalahan PKH semata karena penetapan calon peserta PKH oleh UPPKH Pusat mengambil pertimbangan berdasarkan database yang disediakan oleh TNP2K yang bersumber dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh BPS. Data tersebut yang diberikan kepada UPPKH Kabupaten yang selanjutnya dilakukan validasi oleh pendamping untuk mengetahui keluarga yang memenuhi salah satu kategori penerima bantuan PKH. Sedangkan pendamping yang berhadapan

langsung dengan masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengajukan tambahan untuk peserta PKH walaupun mereka menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat.

Dikarenakan data yang digunakan untuk penetapan peserta PKH menggunakan data pada tahun sebelumnya atau data yang digunakan tidak valid menyebabkan adanya peserta PKH yang sudah dikategorikan keluarga sejahtera yang seharusnya tidak lagi mendapatkan bantuan PKH dan masih banyak keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta penerima bantuan PKH. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan RTSM yang tidak terdaftar sebagai peserta PKH terhadap peserta PKH yang tergolong keluarga mampu.

Hal ini dibenarkan oleh Elvi Yunita, SE selaku pendamping PKH mengungkapkan bahwa sebagian besar KPM dengan keadaan ekonomi yang sudah dikategorikan sejahtera masih ingin mendapatkan program PKH. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pedoman umum PKH serta menjadikan penetapan RTM penerima bantuan kurang tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan mengenai "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota" dapat disimpulakan bahwa PKH memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linear sederhana, Y= 12,130+0,821 X, yang berarti:
    a. Nilai konstanta sebesar 12,130 menyatakan jika variabel PKH (X) sama dengan nol (konstan) maka pengentasan kemiskinan sama dengan 12,130 satuan.
    b. Koefisien regresi b untuk X bertanda positif sebesar 0,821. Hal ini berarti penambahan variabel PKH sebesar satu satuan akan meningkatkan pengentasan kemiskinan sebesar 0,821 satuan. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKH mempunyai pengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan.
2. Data yang sudah diolah menunjukkan bahwa kajian ini memiliki hasil koefisien determinan (R^2) sebesar 0,297. Artinya pengaruh variabel PKH terhadap variabel Pengentasan Kemiskinan adalah sebesar 29,7%. Sedangkan sisanya 70,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

3. Berdasarkan uji t memperoleh hasil sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel atau 5,958 > 1,989. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya PKH (X) berpengaruh nyata terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada peserta PKH agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH. Baik untuk perbaikan kualitas pendidikan maupun kesehatan peserta PKH.
2. Diharapkan dengan adanya Program keluarga Harapan, keluarga miskin dapat semakin menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena tidak mampunya orangtua memenuhi kebutuhan sekolah mereka.
3. Diharapkan semua unsur yang terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.
4. Diharapkan adanya pendataan ulang bagi calon peserta PKH yang dilakukan sesuai prosedur dan dengan mengedepankan kepentingan rakyat miskin agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Program Keluarga Harapan benar-benar bisa tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Apridar. 2013. *Teori Ekonomi: Sejarah dan Perkembangannya*, edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arifin, Zaenal. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Lentera Cendikia.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta

Azwar, Syaifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam,* edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Prenadamedia Group.

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

Istijono, Bambang dkk. 2010. *Kredit Mikro Nagari* : *Upaya Melawan Kemiskinan dari Nagari*. Padang: Bappeda.

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Malang: UIN Maliki Press.

Martono, Nanang.2014. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial,* edisi revisi, cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Setiadi, Elly & Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Munir, Misbahul & Djalaluddin, A. 2014. *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an (Seri Integrasi).* Malang: UIN-Maliki Press.

Nuruddin, Amiur. 2009. *Ekonomi Syariah: Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan.* Bandung: Citapustaka Media Perintis.

P. Siagian, Sondang. 2014. *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Poewadaminta, WJS. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja grafindo Persada.

Resito, Herman. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi, cet. 46. Jakarta: Rajawali Pers.

Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&G).* Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Suryani dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam.*Jakarta: Prenadamedia Group.

Syauqi Beik, Irfan dan Dwi Arsyianti, Laily. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah,* Edisi Revisi, Cet 2. Jakarta : Rajawali Pers.

Thoifah, I'anatut. 2015. *Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: Madani.

Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II.2011. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Ayu Virgoreta, Dyah et. al. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No12.

Budihardjo. 2007. *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 6, Nomor 2, Juli-Desember

Hamdani. *Kemiskinan dalam Pandangan Ekonomi Syariah*. Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

Sri Ekaningsih, Ana. 2013. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2011*. Jurnal Borneo Administrator / Volume 9 / No. 2.

Utomo, Dedy dkk. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri).* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1.

Fitriasari, Fika. 2016. *Sinergi Ekonomi Islam untuk Menanggulangi Kemiskinan*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang. Iqtishoduna Vol. 7 No. 1.

Ilmi, Syaiful. 2017. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak. Al-Maslahah Volume 13 Nomor 1.

Nafiah, Lailatun. 2015. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.* Journal Of Islamic Ekonomic And Business.

Tri Cahya, Bayu. 2015. *Kemiskinan Ditinjau Dari Perspekstif al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari.

Sodiq, Amirus. 2015. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*", Jurnal STAIN Kudus.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Kemsos. *Program Keluarga Harapan.* (Online) tersedia di : https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) tersedia di https://kbbi.web.id/

TNP2K. *Strategi Percepatan Penanggulan Kemiskinan*. (Online) tersedia di http://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/overview-of-the-acceleration-strategy

TNP2K. *Program Penanggulangan Kemiskinan*. (On-line) tersedia di: http://www. tnp2k.go.id/id/ program /sekilas/

Kantor Wali Nagari Maek. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).*